

# **RENCANA STRATEGI TAHUN 2016-2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA  
DAN STATISTIK**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunianya maka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu dapat kami selesaikan.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat atas dasar amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk itu Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu menyusun Renstra tahun 2016-2021, yang mencakup tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu 2016-2021.

Renstra sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 disusun dalam rangka memberikan panduan bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik selama lima tahun ke depan. Dengan demikian, semua kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunnya Renstra ini, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dan Tim Penyusun Renstra yang telah berusaha dengan penuh kesungguhan dan kerja keras sehingga berhasil menyelesaikan penyusunan Renstra ini. Namun sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, perkembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Komunikasi, dan tantangan pembangunan ke depan, Materi Renstra yang disusun ini, masih dimungkinkan adanya penyesuaian dalam pelaksanaannya.

**Putussibau, Desember 2017**  
**Kepala Dinas**  
**Komunikasi, Informatika dan Statistik**  
**Kabupaten Kapuas Hulu,**

**Ir. ISTIWA, M.Si**  
**Pembina TK.I(IV/b)**  
**NIP. 19650507 199803 1 006**

**DAFTAR ISI**

	halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN UMUM PELAYANAN</b> .....	7
2.1. Tugas Pokok dan Fungsi.....	7
2.2. Sumber Daya.....	14
2.3. Kinerja Pelayanan.....	16
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .....	25
<b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b> .....	27
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan .....	27
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	36
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika....	42
3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	38
<b>BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN</b>	40
4.1. Visi, dan Misi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik .....	40
4.2. Tujuan dan Sasaran .....	41
4.3. Strategi dan Kebijakan.....	42
<b>BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN</b> .....	46

**DAFTAR GAMBAR****Gambar 2.1 Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan****DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Sumber Daya Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Tabel 2.2	Aset/Modal Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Tabel 2.3	Rekapitulasi Interaksi Balik dari Pendengar ke Radio Rasika
Tabel 2.4	Data Penerimaan/Tidak menerima Jangkauan Frekuensi Siaran LPPL Rasika
Tabel 4.1	Nama-nama Kelompok Informasi Masyarakat yang sudah terbentuk

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.I. LATAR BELAKANG**

Kedudukan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan pembangunan, maka arus informasi yang cepat dalam berbagai kegiatan sangatlah diperlukan. Untuk mendukung hal tersebut perlu diciptakan sinergi yang bersifat partisipatif dengan memanfaatkan peranan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat mengakses informasi dan ketersediaan data base sekaligus sebagai sarana interaktif 3 (tiga) komponen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yakni; pemerintah, masyarakat dan sektor swasta dalam rangka mewujudkan *Good Governance* sesuai tuntutan reformasi.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang begitu pesat telah mengiringi proses perubahan tatanan dunia dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa batas. Pesatnya informasi global kini tidak hanya merambah di wilayah perkotaan saja, tetapi telah sampai ke pelosok pedesaan sehingga mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat yaitu masih adanya kesenjangan dalam bidang informasi dan komunikasi yang disebabkan oleh keberagaman tingkat pendidikan masyarakat, budaya, dan kondisi geografis serta ketersediaan infrastruktur. Kondisi demikian tentu menjadi tugas negara dalam hal ini pemerintah untuk memfasilitasinya dalam rangka mengurangi kesenjangan tersebut sehingga masyarakat mudah memperoleh informasi yakni melakukan pemerataan infrastruktur, pendayagunaan media informasi dan pemberdayaan lembaga komunikasi masyarakat.

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mebidangi penyebaran informasi, pengembangan dan pendayagunaan TIK dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di bidang koinfo yang dilaksanakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik maka diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informatika, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta

implementasi *e-government* dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Kabupaten Kapuas Hulu.

*E-government* yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif, merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur dan sumberdaya aparatur sebagai pelayan masyarakat.

Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat, mudah dan akurat. Oleh karena itu, untuk mendukung kebutuhan tersebut perlu manajemen pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung jaringan informasi dan komunikasi yang mencakup semua SKPD.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai SKPD yang membidangi komunikasi, Informatika dan Statistik maka disusunlah Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas untuk kurun waktu 5(lima) tahun ke depan untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2016 - 2021 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
  8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten kapuas Hulu 2011-2015;
  12. Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Maksud penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah sebagai pedoman arah pembangunan di bidang penyelenggaraan komunikasi, informatika dan ststistik di Kabupaten Kapuas Hulu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2016 – 2021.

#### **b. Tujuan disusunnya Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2016 – 2021 adalah :**

1. Tersusunnya program dan kegiatan lingkup Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik selama lima tahun ke depan (2016-2021) yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam menyusun

- Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya agar lebih terarah, fokus dan sesuai dengan Renstra.
2. Tersedianya rumusan program pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintahan yang merupakan indikasi program yang tertuang dalam APBD dan sebagai tolak ukur dalam pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.
  3. Mewujudkan sinergitas antar unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu terhadap program dan kegiatan tahun 2016 - 2021.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIK DAN STATISTIK**

- 2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

##### **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

##### **BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

- 4.1. Visi dan Misi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
- 4.2. Tujuan dan Sasaran
- 4.3. Stratefi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR  
KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN  
INDIKATIF

5.1. Program dan Kegiatan

BAB VI PENUTUP

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**

**2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik**

Tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu serta Peraturan Bupati No 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan unit pelayanan secara elektronik (LPSE).

Untuk menjalankan tugas pokok dengan baik maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu perlu mendapat dukungan secara komprehensif dari seluruh pejabat dan staf yang kompeten dan berkualitas serta tenaga profesional untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

**a. Tugas Pokok**

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas pokok yaitu Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika dan Bidang Statistik yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

**b. Fungsi Organisasi**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika dan statistik;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika dan statistic;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika dan statistic;
4. Pelaksanaan administrasi dinas;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **c. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulumemiliki struktur organisasi yang terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris Dinas;
3. Subbagian Program dan Keuangan;
4. Subbagian Umum dan Aparatur;
5. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik;
6. Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika;
7. Unit Pelayanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE).

KaitantugaspokokdanfungsiDinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulutersebutdiatas sebagaimana susunanmenurutbidangdan bagianberikut ini:

#### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan kewenangan di bidang komunikasi, Informatika dan Statistik dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penetapan rencana strategis Dinas Komunikasi, Informatika;
- b. Pengkoordinasian seluruh kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan instansi lainnya;
- c. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan di Bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- d. Pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan rencana operasional dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan dibidang Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- f. Pemantauan, pengawasan dan perkembangan pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika secara periodik;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **2. Sekretariat Dinas**

Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan

pembinaan administrasi dan teknis operasional serta memberikan pelayanan administrasi urusan keuangan, perencanaan dan umum, aset dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. Pengkoordinasian penyusunan program kerja Dinas;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
- d. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur, dan tata laksana Dinas;
- e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik Dinas;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Dinas;
- g. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Subbagian Program dan Keuangan**

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, pengevaluasian, dan pelaporan program kerja serat pengelolaan administrasi keuangan Dinas. Untuk melaksanakan tugas, Subbagian program melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan program kerja Dinas;
- c. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;
- d. Penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Dinas;
- e. Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dari setiap Bidang dan UPT;
- f. Pengendalian dan pelaporan program kerja dinas;
- g. Penyelenggaraan tata usaha keuangan Dinas;

- h. Penyusunan Neraca, Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas;
- i. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan Dinas;
- j. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Program dan Keuangan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. Subbagian Umum dan Aparatur**

Subbagian Umum dan Aparatur bertugas membantu Sekretariat dalam pelaksanaan tugas mengumpulkan dan mengolah bahan administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik Dinas. Untuk melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Aparatur melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur;
- b. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pembangunan aparatur Dinas;
- c. Penyelenggaraan ketatalaksanaan Dinas;
- d. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- e. Pengelolaan barang milik Dinas;
- f. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **5. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik**

Bidang Komunikasi dan Informasi Publik bertugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informasi publik. Untuk melaksanakan tugas Bidang Komunikasi dan Informasi Publik melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja Bidang Komunikasi dan Informasi Publik;

- b. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang Komunikasi dan Informasi Publik;
- c. Pembinaan komunikasi dan media publik;
- d. Pengelolaan informasi publik;
- e. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Komunikasi dan Informasi Publik;
- f. Pengevaluasian pelaksanaan seksi-seksi pada Bidang Komunikasi dan Informasi Publik;
- g. Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Komunikasi dan Informasi Publik secara periodik; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Komunikasi dan Informasi Publik terdiri dari dua seksi yaitu:

**1. Seksi Pengelolaan Informasi**

Seksi Pengelolaan Informasi bertugas membantu Bidang Komunikasi dan informasi publik dalam penyampaian bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan informasi publik. Untuk melaksanakan tugas Seksi Pengelolaan Informasi melaksanakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Informasi;
- b. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan informasi publik;
- c. Pengumpulan dan pengelolaan informasi publik;
- d. Pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah;
- e. Pelayanan informasi publik;
- f. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Informasi; dan
- g. Pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**2. Seksi Komunikasi dan Media Publik**

Seksi Komunikasi dan Media Publik bertugas membantu Bidang Komunikasi dan Informasi Publik dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan komunikasi dan media publik. Untuk melaksanakan tugas Seksi Komunikasi dan Media Publik melaksanakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Komunikasi dan Media Publik;
- b. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan komunikasi dan media publik;
- c. Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
- d. Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
- e. Penyediaan akses informasi di kabupaten;
- f. Pembinaan pengelolaan media komunikasi publik;
- g. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Komunikasi dan Media Publik; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **6. Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika**

Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika bertugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika. Untuk melaksanakan tugas Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program kerja Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika;
- b. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika;
- c. pelaksanaan statistik sektoral;
- d. pengelolaan aplikasi informatika;
- e. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika;
- f. pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika;
- g. pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika secara periodik; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika terdiri dari dua seksi yaitu :

## 1. Seksi Statistik

Seksi Statistik bertugas membantu Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika dalam penyampaian bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pelaksanaan statistik sektoral. Untuk melaksanakan tugas Seksi Statistik melaksanakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Statistik;
- b. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pelaksanaan statistik sektoral;
- c. pelaksanaan statistik sektoral;
- d. pemberian dukungan survei skala nasional di tingkat kabupaten;
- e. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Statisti; dan
- f. pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Seksi Aplikasi Informatika

Seksi Aplikasi Informatika bertugas membantu Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan aplikasi informatika. Untuk melaksanakan tugas Seksi Aplikasi Informatika melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Aplikasi Informatika;
- b. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan Aplikasi Informatika;
- c. pengelolaan nama domain serta pengelolaan *e-government* di lingkungan pemerintah daerah;
- d. pemberdayaan informatika meliputi *data center*, *disaster recovery center*, Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) pengembangan internet dan penggunaan akses internet pelayanan sistem komunikasi intra pemerintah di kabupaten;
- e. pengintegrasian layanan publik dan pemerintahan di kabupaten;
- f. pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi di kabupaten serta pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat;

- g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Aplikasi Informatika; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika sesuai dengan tugas dan fungsinya.

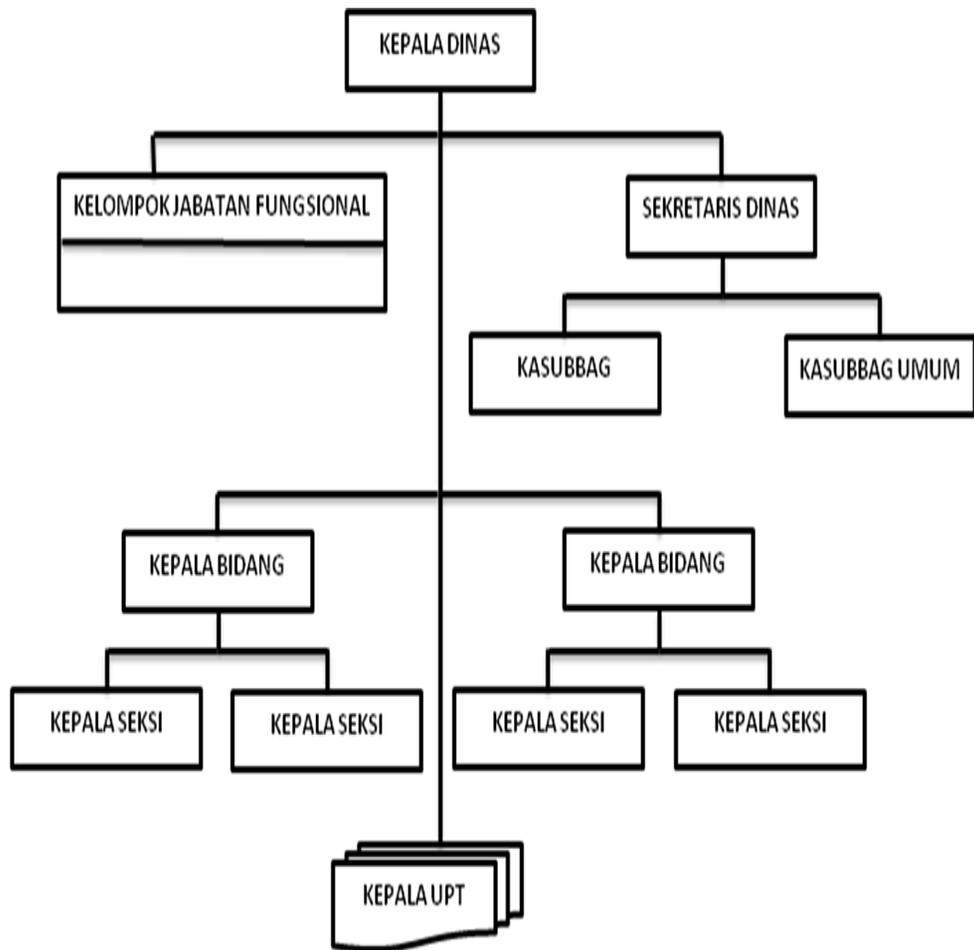
## **7. Unit Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik**

Unit Pelayanan Pengadaan secara Elektronik dipimpin oleh seorang kepala unit kepala unit mempunyai tugas pokok memimpin penyelenggaraan pelayanan pengadaan secara elektronik sesuai wewenang yang dilimpahkan dan peraturan perundang-undangan. Kepala unit berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

LPSE Kabupaten Kapuas Hulu sebagai salah satu unit pelaksana layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan layanan pengadaan secara elektronik;
- b. Memfasilitasi rencana umum pengadaan (RUP);
- c. Pengelolaan e-Procurement atau Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sebagai User Management untuk Aplikasi SiRUP serta Monev OL/TEPRA;
- d. Menyediakan pelatihan kepada Panitia/ULP dan Penyedia barang/jasa serta pengguna lainnya;
- e. Menyediakan akses internet bagi Panitia/ULP dan Penyedia barang/jasa serta pengguna lainnya;
- f. Menyediakan bantuan teknis untuk mengoperasikan SPSE kepada Panitia/ULP dan Penyedia barang/jasa serta pengguna lainnya;
- g. Melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap Admin Agency penyedia barang/jasa dan pengguna lainnya;

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :



## 2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Jumlah pegawai dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 20 orang. Sedangkan tenaga non PNS berjumlah 15 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1

Sumber Daya Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

NO	ESELON/ NON ESELON	PENDIDIKAN						GOLONGAN			
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	1V	III	II	I
1.	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	III	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-
3.	IV	1	2	-	4	-	-	-	7	-	-
<b>SUB JUMLAH</b>		<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.	NON ESELON	-	4	3	3	-	-	-	7	3	-
5.	HONORER	-	2	4	9	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>4</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>-</b>

## 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu melakukan upaya untuk memfasilitasi terwujudnya *good governance*, pengurangan terjadinya kesenjangan informasi, penyebaran informasi dan pemberdayaan kepada masyarakat di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Agar tujuan kebijakan daerah dapat dicapai, diperlukan kemampuan/kapasitas yang disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat, dimana kemampuan/kapasitas adalah kemampuan seorang individu, sebuah organisasi atau sebuah sistem untuk melaksanakan fungsi dalam pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).

Kondisi yang diharapkan adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik harus memiliki kemampuan/kapasitas dalam melayani tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan, dinamika dan kemajuan masyarakat, sehingga tujuan dan

sasaran pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional dapat dicapai.

Berdasarkan hal tersebut peluang Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagai lembaga teknis daerah dan pengelolaan teknologi informasi untuk menjadi konsultan perencanaan. Kemampuan/kapasitas tersebut tergantung pada sarana dan prasarana pendukung, antara lain, gedung/kantor yang representatif dan peralatan teknologi baik yang digunakan untuk menunjang aktivitas maupun untuk pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi.

Proses pelayanan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu yaitu sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang berikut ini:

### **1. Bidang Komunikasi Informasi Publik**

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang komunikasi informasi publik secara garis besar terkait dengan kegiatan penyebarluasan informasi kepada masyarakat serta penyerapan aspirasi/aduan/kritik dan saran dari masyarakat terhadap pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Peningkatan kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika Publik (KIP) dalam melaksanakan tugas dan fungsi memberikan pelayanan penyebarluasan informasi pembangunan daerah, Mengelola, melestarikan dan menyelenggarakan pelayanan komunikasi dan informasi Publik dalam rangka peningkatan pelayanan penyebarluasan informasi baik melalui Lembaga penyiaran Publik Lokal Radio (LPPL) Rasika Kapuas Hulu, Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) melalui sosialisasi dan pembinaan Keterampilan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai Mitra pemerintah dalam rangka menyampaikan dan penyebarluasan informasi, Penyediaan informasi memanfaatkan media tradisional melalui kegiatan Apresiasi Media Tradisional dalam Penyampaian Informasi dan Komunikasi secara cepat, tepat dan akurat kepada Publik.

**a) Kegiatan Peliputan dan Dokumentasi kegiatan pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu**

Kegiatan Peliputan dan Dokumentasi merupakan kegiatan yang telah disusun secara reguler pada setiap tahun anggaran. Output dari kegiatan ini adalah Buletin Uncak Kapuas yang terbit 4(empat) kali dalam setahun. Namun pada perencanaan anggaran kedepan melalui Renstra Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu 2016-2021, bahwa pada kegiatan ini akan dirubah output kegiatan berupa Kaleodoskop Dokumentasi kegiatan pembangunan yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran berjalan. Konten yang ada dalam album kaleodoskop ini akan mendokumentasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bupati, Wakil Bupati dan Dinas Kominfo Statistik dari awal tahun anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran. Melalui peliputan dan pendokumentasian ini, diharapkan dapat menjadi sumber informasi visual bagi masyarakat yang ingin melihat progres pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten melalui unsur pimpinan daerah.

**b) Kegiatan Pengembangan Media Siaran LPPL Rasika FM Melalui *Protocol Streaming***

Radio Siaran Kapuas Hulu (Rasika) merupakan salah satu lembaga penyiaran publik lokal (LPPL) yang dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu. Radio ini berdiri sejak tahun 1992 dan pada tahun 2014 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah dengan nama lembaga RASIKA melalui frekuensi 103,4 FM. Radio Rasika saat ini berfungsi sebagai media informasi bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait dengan perkembangan pembangunan di Kapuas Hulu. Pada saat ini jangkauan siaran Radio Rasika masih terbatas, yakni hanya sekitar mencakup 30% dari seluruh kecamatan di Kapuas Hulu. Untuk itu, melalui Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik Kabupaten Kapuas Hulu ini, selain peningkatan jangkauan frekuensi melalui pengadaan booster, pengembangan jangkauan siaran radio akan dibuat alternatif melalui *protocol streaming*, sehingga siaran radio rasika tidak hanya sebatas pada lingkup

geografis terdekat, tetapi juga akan dapat di dengar secara global dimanapun berada sepanjang terdapat jaringan internet. Melalui kegiatan pengembangan *protocol streaming* ini, diharapkan informasi terkait dengan Kapuas Hulu akan dapat lebih didengar dengan skala yang lebih luas.

**c) Penyusunan dan Pengelolaan Sistem Informasi Layanan Publik**

Salah satu tugas pokok dan fungsi Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, selain melaksanakan penyebaran informasi juga melakukan penyerapan aspirasi dari masyarakat terkait dengan proses pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah. Fungsi penyerapan aspirasi ini merupakan item fungsi baru sejak Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik berdiri sendiri pada Tahun 2017. Sehingga kegiatan Penyusunan dan Pengelolaan Sistem Informasi Layanan Publik ini baru dapat direncanakan untuk dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018. Ada 3 (tiga) hal yang akan dilaksanakan pada sistem informasi ini, antara lain :

1. Layanan Informasi Publik, yaitu layana informasi kepada masyarkat melalui autoreply sms sesuai dengan kebutuhan informasi yang diinginkan oleh masyarakat. Penyusunan sistem ini akan diawali dengan melaksanakan koordinasi ke seluruh OPD yang memiliki tupoksi pelayanan publik. Koordinasi ini akan merangkum semua layanan publik baik berupa persyaratan layanan dan kontak person layanan. Setelah mendapatkan semua informasi ini, akan di input ke media sms autoreply bekerjasama dengan salah satu provider yang memiliki jangkauan luas di Kapuas Hulu. Tujuan dari sistem layanan ini adalah untuk mempermudah masyarakat mencari informasi terkait persyaratan dan lain-lain terhadap layanan yang diinginkan.

sebagai contoh : apabila ada masyarakat di kecamatan yang jauh dari putussibau, ingin membuat IMB, maka yang bersangkutan cukup mengirim SMS dengan kode : LAYANAN PUBLIK IMB kirim ke 9696 (contoh), maka akan di reply oleh provider dengan konten persyaratan yang harus dilengkapi disertai dengan kontak person layanan,

sehingga pada saat masyarakat datang ke putussibau untuk menyampaikan persyaratan sudah tidak ada kendala/kekurangan lagi.

2. Layanan Pengaduan, layanan ini merupakan tujuan utama dari pengembangan sistem informasi ini. Melalui layanan ini, masyarakat dapat berkontribusi terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kontribusi tersebut berupa pengawasan terhadap segala kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah baik itu yang berupa fisik dan non fisik. Sebagai contoh, apabila ada pelaksanaan proyek pengerjaan jalan disalah satu lingkungan masyarakat, dan masyarakat merasakan adanya kejanggalan pada proyek tersebut karena spek proyek yang tidak sesuai dengan pengerjaan, maka masyarakat dapat menyampaikan permasalahan tersebut melalui media SMS Center dengan mengirim SMS :  
ADUAN#NAMA#NO.KTP#ISI ADUAN. Dengan informasi yang masuk tersebut akan ditindak lanjuti oleh Diskominfo Statistik sesuai SOP yang ada.

Melalui layanan ini, diharapkan masyarakat akan mendapatkan jawaban yang valid terkait dengan pelaksanaan pembangunan diwilayah mereka, selain itu hal ini akan mendorong transparansi kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada khususnya.

3. Layanan *Broadcast*, layanan ini merupakan salah satu penyebarluasan informasi dari atas ke bawah, artinya pada jajaran pimpinan daerah dapat memberikan informasi langsung kepada jajaran dibawah sampai dengan lingkup aparat desa. Pembangunan data sistem ini akan dilaksanakan dengan melakukan sensus no ponsel aparat pemerintah desa, pejabat struktural diwilayah kecamatan dan kabupaten serta kepala UPT diseluruh Kapuas Hulu. Melalui layanan ini, pimpinan daerah akan memiliki akses penyampaian informasi baik secara massal, custom maupun personal terhadap seluruh bawahannya. Sehingga apabila ada arahan yang bersifat strategis dan

membutuhkan waktu segera untuk dilaksanakan, maka layanan ini dapat sangat membantu agar pesan tersebut dapat langsung diterima oleh aparat yang menanganinya. Harapannya adalah pelaksanaan arahan pimpinan dapat segera diterima dan dilaksanakan sehingga pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat secara umum dapat terlaksana dengan lancar.

**d) Sosialisasi Sistem Penyebarluasan informasi melalui SMS Broadcast, SMS Center dan SMS Gateway**

Sosialisasi Sistem informasi ini merupakan tindak lanjut dari pengembangan Sistem Informasi Layanan Publik yang telah dibuat. Perencanaan kegiatan sosialisasi ini rencananya akan dilaksanakan keseluruhan wilayah kecamatan dengan membagi kegiatan melalui zonasi agar lebih efektif. Harapan dari sosialisasi agar masyarakat mengetahui dan dapat memanfaatkan secara optimal dari layanan informasi. Sehingga apa yang diharapkan dari pengembangan sistem informasi ini dapat berjalan sesuai dengan tujuannya.

**e) Sosialisasi tentang Manfaat dan Bahaya penggunaan Komunikasi dan Informasi di Media Publik.**

Media Publik atau secara khusus lagi dapat disebut sebagai media sosial, merupakan media yang telah menjadi salah satu bagian hidup masyarakat, khususnya kalangan remaja. Pengaruh gaya hidup, trend serta hal hal lain (positif dan negatif) dapat dengan mudah diperoleh melalui media ini. Sehingga manfaat dan mudharat dari media sosial sekarang tergantung dari bagaimana penggunaannya. Untuk itu, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik yang merupakan lembaga pemerintah yang menangani hal tersebut perlu untuk membuat kegiatan sosialisasi agar masyarakat, khususnya kalangan remaja dapat menggunakan media publik/sosial kepada nilai-nilai positif. Selain melaksanakan sosialisasi, dinas kominfo juga akan melaksanakan kampanye-kampanye tentang pemanfaatan media publik kepada masyarakat melalui berbagai media yang ada seperti : website, radio, baleho dan media cetak. Harapan yang diinginkan dari kegiatan ini adalah pemanfaatan teknologi oleh masyarakat kearah yang positif

dan produktif.

**f) Kegiatan Peningkatan Operasional Layanan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Rasika Kapuas Hulu FM sebagai media penyebarluasan informasi**

Operasional layanan informasi melalui LPPL Rasika melayani kepentingan masyarakat umum secara luas, mengembangkan budaya bangsa, memajukan kesejahteraan umum guna membangun masyarakat yang mandiri, demokrasi, adil dan sejahtera melalui tersedianya informasi yang memadai.

Radio Rasika FM 103,4 Mhz berdiri tahun 2002 yang dasar hukumnya berdasarkan pada Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 43 Tahun 2012. Dengan adanya aturan yang mengharuskan Radio Rasika FM 103,4 Mhz menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal (UU NO 32 TAHUN 2002 PASAL 14 (1) bahwa Lembaga Penyiaran Publik lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat, maka melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2014 sehingga LPPL Rasika memiliki badan Hukum yang jelas.

Selain Peraturan Daerah LPPL Rasika juga memiliki ijin penyiaran yang di terbitkan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Radio Rasika FM 103,4 Mhz kedudukannya dalam naungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan berada di bawah pengawasan dan pengelolaanya oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang saat ini tugas dan fungsinya keberadaan LPPL Rasika berada pada Bidang Komunikasi dan Informasi Publik (KIP).

**Tabel 2.2**  
**Rekapitulasi Interaksi Balik dari Pendengar Ke Radio Rasika**  
**(Via Telepon dan SMS) Tahun 2015 – 2016**

<b>Interaksi Balik dari Pendengar Ke Radio Rasika</b> <b>(Via Telepon dan SMS)</b>				
<b>No</b>	<b>Nama Program Siaran</b>	<b>Jumlah Siar</b>	<b>Bentuk Interaksi</b>	<b>Jumlah</b>
1	Program Balas Pantun	1300	SMS/Telpon	805
2	Program Beita Kapuas Hulu	211	Jumlah Berita Yang disiarkan	270
3	Program Dangdut Sore	3806	SMS/Telpon	2296
4	Program Dapur Kita	260	Materi Yang disiarkan	140
5	Program Dendang Melayu	972	SMS/Telpon	637
6	Program Dunia Anak	156	Materi Yang disiarkan	112
7	Program Dunia Kerja	183	Materi Yang disiarkan	154
8	Program Dunia Kesehatan	52	Materi Yang disiarkan	31
9	Pembangunan Kapuas Hulu	255	Materi Yang disiarkan	176
10	Informasi Wanita	156	Materi Yang disiarkan	112
11	Program Kisah Inspiratif	97	Materi Yang disiarkan	91
12	Subak Barik	52	Materi Yang disiarkan	28
13	Program Lagu Ngulak	1018	SMS/Telpon	623
14	Katolik	780	Lagu Yang diputarkan	420
15	Kristen	780	Lagu Yang diputarkan	420
16	Program Musik By SMS	1590	SMS/Telpon	987
17	Pekan	2254	SMS/Telpon	1106
18	Program Musik Daerah	1254	SMS/Telpon	763
19	Program Musik Islami	502	Lagu Yang diputarkan	284
20	Program Musik Lawas	1085	SMS/Telpon	686
<b>No</b>	<b>Nama Program</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Bentuk Interaksi</b>	<b>Jumlah</b>

	Siaran	Siar		
21	Minggu	1040	SMS/Telpon	708
22	Program Musik Tetangga	1040	SMS/Telpon	721
23	Program Mutiara Malam	285	Lagu Yang diputarkan	112
24	Program Ramalan Bintang	52	Lagu Yang diputarkan	28
25	Permasalahannya	255	Lagu Yang diputarkan	96
26	Program Sahabat Rasika	1998	SMS/Telpon	723
27	Budaya Daerah	134	Lagu Yang diputarkan	91
28	Program Selamat Pagi Uncak Kapuas	185	Lagu Yang diputarkan	133
29	Program SPUK Uncak Kapuas	758	Lagu Yang diputarkan	672
29	Program Tahukah Anda	52	Lagu Yang diputarkan/SMS/Telpon	31
30	Rasika	1596	Lagu Yang diputarkan	950
31	Program Voice Of Islam	48	Lagu Yang diputarkan	28

**g) Kegiatan Peningkatan Jangkauan Penerimaan Frekuensi LPPL Radio Rasika FM Kabupaten Kapuas Hulu**

Jangkauan Penerimaan LPPL Rasika FM Kabupaten Kapuas Hulu belum menjangkau 23 Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu maka perlu adanya peningkatan Kapasitas Frekuensi Penerimaan Siaran LPPL Radio Rasika Kabupaten Kapuas Hulu agar bisa menjangkau ke 32 Kecamatan.

Berdasarkan Hasil Montoring Penerima Jangkauan Frekuensi LPPL Rasika Kecamatan yang menerima Jangkauan frekuensi LPPL Rasika FM sebanyak 10 Kecamatan dan yang belum menerima Jangkauan Penerimaan Frekuensi LPPL Rasika FM sebanyak 13 Kecamatan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.3**  
**Data Penerimaan /Tidak Menerima Jangkauan Frekuensi Siaran LPPL**  
**Rasika Kabupaten Kapuas Hulu**

NO	Kecamatan yang menerima Jangkauan Frekuensi LPPL Rasika	NO	Kecamatan yang tidak menerima Jangkauan Frekuensi LPPL Rasika
1.	Putussibau utara	1.	Embaloh hulu
2.	Putussibau selatan	2.	Badau
3.	Kalis	3.	Empanang
4.	Bika	4.	Puring kencana
5.	Mentebah	5.	Seberuang
6.	Bunut hilir	6.	Semitau
7.	Embaloh hilir	7.	Silat hilir
8.	Batang lupar	8.	Silat hulu
9.	Bunut hulu	9.	Jongkong
10.	Pengkadan	10.	Selimbau
11.	Boyan tanjung	11.	Suhaid
12.	Hulu gurung		
<b>JUMLAH 23 KECAMATAN</b>			

**h) Kegiatan peningkatan sarana dan Prasana Peralatan Studio Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Rasika Kabupaten Kapuas Hulu**

Guna meningkatkan operasional penyampaian informasi kepada masyarakat secara efisien maka dibutuhkan sarana dan prasana yang memadai demi Terwujudnya media informasi sebagai media pendidikan yang representasi dan hiburan yang sehat serta mampu menjadi perekat sosial dengan mangakomondasikan aspirasi dan apresiasi seni budaya lokal dan nasional dalam membangun masyarakat yang partisipatif di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

**i) Kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kelompok Informasi masyarakat (KIM) di Kabupaten Kapuas Hulu**

Keterbukaan untuk memperoleh informasi semakin hari mengalami desakan yang cukup signifikan seiring dengan tuntutan di era globalisasi saat ini, dengan disahkannya Undang-

undang Nomor 14 tahun 2008. Dibentuk Kelompok Informasi Masyarakat (Kim) yang berfungsi sebagai wahana informasi dan komunikasi antara anggota Kelompok Informasi Masyarakat (Kim) dengan pemerintah atau sebaliknya, sebagai mitra dialog dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik, sebagai sarana peningkatan pemberdayaan masyarakat dibidang informasi dan sebagai lembaga atau kelompok.

Kelompok Informasi Masyarakat (Kim) dibentuk untuk menemukan masalah bersama mengenai diskusi anggota kelompok, mengenali cara pemecahan masalah, membuat keputusan bersama, melaksanakan keputusan dengan kerjasama dan mengembangkan jaringan informasi untuk memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan. Nama-nama Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kabupaten Kapuas Hulu yang sudah terbentuk dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4

**Nama – nama Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)  
Kabupaten Kapuas Hulu yang Sudah Terbentuk**

NO	NAMA KIM	DESA	KECAMATAN	KETERANGAN
1	Ketam Bersatu	Sungai Besar	Bunut Hulu	Sudah Di Bantu Akses Internet Dan Radio Monitor
2	Nandang Pasulang	Tekudak	Kalis	Sudah Di Bantu Akses Internet Dan Radio Monitor
3	Saridan	Sebintang	Kalis	Sudah Di Bantu Radio Monitor
4	Nandang Tekalong	Tekalong	Mentebah	Sudah Di Bantu Akses Internet Dan Radio Monitor
5	Dengah	Tanjung Karang	Putussibau Utara	Sudah Di Bantu Radio Monitor
NO	NAMA KIM	DESA	KECAMATAN	KETERANGAN
6	Sekilas Info	Tanjung Jati	Putussibau Selatan	2 Juni 2015 Sudah Di Bantu Akses Internet Dan Radio Monitor

7	Bukit Biru	Sejiram	Seberuang	Sudah Di Bantu Radio Monitor
8	Kedaung Mahkota Info	Nibung	Selimbau	Belum Mendapat Bantuan
9	Sura Dirja	Bunut Hulu	Bunut Hilir	Sudah Di Bantu Akses Internet
10	Piasak Info	Piasak Hilir	Piasak Hilir	Sudah Di Bantu Akses Internet
11	Dangona Banuaka	Ulak Pauk	Embaloh Hulu	Belum Mendapat Bantuan
12	Podi Informatika	Martadana	Pengkadan	Belum Mendapat Bantuan
13.	Amkers Mania	Kelakar	Hulu Gurung	Belum Mendapat Bantuan
14	Ampan Informatika	Permata	Pengkadan	Belum Mendapat Bantuan

**j) Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Singkat Jurnalis untuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)**

Maksud dilaksanakan kegiatan sosialisasi Singkat jurnalistik adalah untuk menuju masyarakat dan kelompok informasi masyarakat yang cerdas, kreatif dan mandiri yang ber-inovatif dan ber-kreatif dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia (sdm) di bidang informasi dalam penulisan naskah berita sebagai bahan penyebarluasan informasi dalam mendukung kemajuan pembangunan dan informasi di kabupaten kapuas hulu. Dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan serta pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan tugas dan fungsinya guna meningkatkan kualitas kelompok informasi masyarakat menuju masyarakat informasi, untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya kelompok informasi masyarakat secara mandiri, cerdas dan kreatif dalam penataan perkembangan wilayah pedesaan, wilayah perbatasan dan wilayah tertinggal di Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk meningkatkan kemampuan anggota kelompok informasi masyarakat dalam mengakses dan mengelola informasi dalam rangka mengatasi kesenjangan informasi serta untuk

meningkatkan dan mengembangkan aktifitas dalam memberikan nilai tambah dan manfaat bagi kelompok informasi masyarakat dalam mendayagunakan informasi.

**k) Kegiatan Pelatihan Sumber Daya Manusia dalam Bidang Komunikasi dan Informasi**

Pelatihan Sumber daya Manusia di bidang Komunikasi dan Informasi khususnya bagi kelompok informasi masyarakat (KIM) adalah untuk memberikan pengetahuan Komunikasi yang baik dan benar dalam media informasi publik serta untuk Memberdayakan masyarakat agar memperoleh informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat dan diharapkan mampu untuk mengelola dan menghadirkan informasi timbal balik yang baik dan dapat menjadi wahana masyarakat untuk memperoleh dan meyalurkan informasi, sebagai sumber informasi yang terpercaya, aktual dan faktual bagi masyarakat agar tujuan mengenai kebutuhan informasi, kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung keberhasilan pembangunan dapat terwujud.

**l) Kegiatan Desiminasi Media Tradisional melalui Pertunjukan Rakyat**

Kegiatan penyampaian informasi melalui media tradisional berupa pertunjukan rakyat yang di kemas dalam bentuk lakon atau drawa maupun sandiwara yang dilaksanakan pada kegiatan Apresiasi Informasi Media Tradisional dengan menunjuk Sanggar Lancang Kuring Nurul Iman Putussibau untuk mengikuti kegiatan Apresiasi Seleksi Informasi Media Tradisional di tingkat Provinsi Kalimantan Barat.

Kegiatan Apresiasi Media Tradisional sudah dilaksanakan di kabupaten Sintang tahun 2015 di mana pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah berhasil sebagai peringkat (Juara III) tingkat provinsi Kalimantan Barat yang dilaksanakan di Sintang.

Sedangkan pelaksanaan Apresiasi Media Tradisional tahun 2016 di Singkawang Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu kembali mengirimkan Sanggar lancing Kuning Nurul Iman Putussibau namun belum berhasil mendapat peringkat.

Kegiatan Apresiasi Media Tradisional ini dilaksanakan Dalam rangka persiapan Pekan Informasi Nasional (PIN) serta untuk mempertahankan budaya media komunikasi tradisional sebagai sarana penyampaian informasi melalui media tradisional kepada masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai sosial kepada masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu di Tingkat Nasional.

**m) Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Website Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu**

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensipemanfaatannya yang luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan danpendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Hal ini disadari oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu untuk mengembangkan layanan publik secara efektif, efisien, transparan danakuntabel. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi di pemerintahan dapatmengakomodasi aspirasi masyarakat untuk memperoleh informasi yang dapat diandalkan,terpercaya, mudah didapat, dan tersaji secara interaktif.

Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi ini adalahinternet website. Website atau lazim disingkat web adalah halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga bisa diakses di seluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet.

Fungsi paling dasar dariwebsite yang ingin dimanfaatkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai media informasi dankomunikasi dari dan kepada publik. Di level kedua, fungsiwebsite yang ingin di manfaatkan adalah agar menjadi media interaktif keterhubungan dengan lembaga/instansi lain.Tingkat berikutnyaawebstedibangun untuk memberikan transaksi pelayananpublik. Sedangkan pada level keempat, fungsi dariwebsiteini adalah pemanfaatanwebsiteyang mengintegrasikan aplikasi untuk pelayanan *Government to Government*(G2G), *Government to Business* (G2B), *Government to Consumers* (G2C).

Secara umum, Kabupaten Kapuas Hulu telah memiliki website utama yaitu :[www.kapuashulukab.go.id](http://www.kapuashulukab.go.id), dengan beberapa sub domain website SKPD. Oleh Karena itu, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu sebagai salah satu leading sector pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pemerintah dirasa sangat perlu untuk membuat, dan mengembangkan website dengan domain :[www.komifo.kapuashulukab.go.id](http://www.komifo.kapuashulukab.go.id).

Pencanangan website [www.komifo.kapuashulukab.go.id](http://www.komifo.kapuashulukab.go.id) adalah untuk memenuhi fungsi komunikasi dan penyediaan informasi kepada publik, membangun citra positif, menjalin hubungan online/ dalam jaringan interaktif dengan lembaga/instansi lain, serta dapat berintegrasi dengan aplikasi pelayanan pemerintah/publik yang telah ada maupun yang akan ada.

**n) Kegiatan Dokumentasi Berbasis Data Digital Pada Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu**

Digitalisasi merupakan tren yang merebak di masyarakat, swasta, organisasi dan pemerintah. Hal ini disadari benar oleh pemerintah yang mana menggalakan salah satu program yaitu sistem E- Government. Proses alih media dari dokumen cetak, audio, video menjadi bentuk digital disebut SCANNING atau DIGITALISASI.

Fungsi digitalisasi adalah untuk pelestarian bahan pustaka serta sebuah langkah preventif menghindari kerusakan bahan pustaka dari faktor alam dan faktor manusia, adapun faktor alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor dan bencana vulkanis. Adapun faktor manusia seperti kehilangan koleksi, koleksi rusak akibat kesalahan manusia.

Dari kemanfaatan, fleksibilitas dan kemudahan akses, perpustakaan atau kearsipan perlu memikirkan pelestarian koleksi tercetak mereka salah satunya dengan melakukan digitalisasi. Digitalisasi merupakan salah satu cara pelestarian bahan pustaka tercetak, tentu saja digitalisasi ini harus disertai dengan payung hukum yang jelas dari institusi yang mana jangan

sampai langkah, proses, dan kegiatan digitalisasi ini melanggar hak cipta.

### 3. Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika

Mengingat pentingnya peranan teknologi informasi dan komunikasi, kebutuhan akan infrastruktur komunikasi dan informatika yang terus di *upgrade* secara kontinuedan konsisten, sangat diperlukan dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD baik secara internal maupun eksternal, dimana penerapan *e-government* yang komprehensif sesuai kebutuhan berbagai lapisan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu dapat tercapai.

Seksi Aplikasi Informatika dan Statistik pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu berperan aktif memberikan pelayanan internet kepada masyarakat melalui Media Center Kabupaten, Penyebarluasan Informasi melalui *Mobile Community Access Point* (M-CAP), Penyuluhan mengenai Internet Sehat, Penyediaan Data Center sebagai Pusat Data bagi website Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, melakukan pengelolaan situs [www.kapuashulukab.go.id](http://www.kapuashulukab.go.id), situs elektronik mail Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, situs layanan pengadaan secara elektronik, situs satuan perangkat daerah, situs dewan perwakilan rakyat daerah.

#### a) Kegiatan Updating Data Pokok

Kegiatan Updating Data Pokok meliputi Penyebaran Formulir pengisian Data Pokok ke Setiap Kecamatan, dan Desa di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu dan Pengembalian Formulir Pengisian Data Pokok yang sudah diisi oleh setiap Kecamatan dan Desa di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu untuk dihimpun, direkapitulasi dan disusun menjadi BUKU DATA POKOK KABUPATEN KAPUAS HULU.

#### b) Survey Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu

Kegiatan Survey Statistik Sektoral Kabupaten meliputi survey yang dilaksanakan di seluruh sektor di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu sebelum form dari Data

Pokok disebarkan ke Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

**c) Survey Statistik Dasar Kabupaten Kapuas Hulu**

Kegiatan Survey Statistik Dasar Kabupaten Kapuas Hulu meliputi kegiatan survey penduduk, ekonomi dan pertanian dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu sebelum form Data Pokok dasar diserahkan kepada Petugas Pengumpul Data.

**d) Sosialisasi Tugas dan Fungsi Petugas Pengumpulan Data**

Kegiatan yang dilaksanakan untuk peningkatan Sumber Daya Manusia tentang tugas dan fungsi Pengumpul Data Pokok dalam menyusun data yang telah terkumpul di Kabupaten Kapuas Hulu.

**e) Pempulan Data di Semua Sektor**

Formulir Pengisian Data Pokok yang sudah disampaikan ke Kecamatan ataupun Desa di isi dan diambil kembali oleh Dinas Komunikasi, Informatika Statistik Kabupaten untuk di input kemudian dicetak dijadikan BUKU DATA POKOK Kabupaten Kapuas Hulu.

**f) Monitoring dan Evaluasi Pengumpulan Data Pokok Di Kabupaten Kapuas Hulu**

Kegiatan monitoring dan evaluasi tentang Data Pokok agar proses pengumpulan data dapat termonitor dievaluasi untuk mengetahui hambatan dan solusi di alam proses pengumpulan Data Pokok yang sudah dilaksanakan.

**4. UPT LPSE**

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya (K/L/D/I) untuk menyelenggarakan sistem Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik serta memfasilitasi Unit Layanan

Pengadaan/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

LPSE sebagai unit kerja yang menyelenggarakan Sistem Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (SPSE), kemudian diharapkan dapat melaksanakan fasilitasi layanan pengadaan barang/jasa yang terintegrasi secara tepat sasaran, bersih, transparan, dan akuntabel. LPSE didirikan sebagai perwujudan upaya peningkatan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dalam mengimplementasikan fungsi diatas maka LPSE Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

**1. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi LPSE Kabupaten Kapuas Hulu.**

Kegiatan ini mencakup Pemenuhan sarana dan prasarana, Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Operasional LPSE Kabupaten Kapuas Hulu agar LPSE Kapuas Hulu dapat menjamin kelancaran pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Kabupaten Kapuas Hulu.

**2. Kegiatan Pemutakhiran Data Rencana Umum Pengadaan dan Pengguna aplikasi E-Procurement.**

Kegiatan ini untuk mendukung kelancaran Pengumuman Rencana Umum Pengadaan dan penggunaan aplikasi SPSE. Adapun pemutakhiran yang dilakukan berupa data pengguna aplikasi SiRUP dalam hal ini digunakan untuk pembuatan akun pada aplikasi SiRUP serta mendukung kelancaran pengumuman Rencana Umum Pengadaan yang harus segera diumumkan pada portal LPSE. Pemutakhiran data ini dilaksanakan dalam rangka update data pengguna aplikasi apabila terdapat perubahan data.

**3. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Aplikasi SPSE**

Monitoring dan Evaluasi dilakukan untuk mengetahui dan mengatasi kendala atau masalah yang terjadi dilapangan sehingga dapat dilakukan proses perbaikan dan perubahan kedepan dalam Penggunaan Aplikasi SPSE.

#### **4. Kegiatan Sosialisasi Aplikasi *E-Procurement***

Sosialisasi Aplikasi *E-Procurement* diperlukan untuk memberikan pemahaman dan penyampaian informasi kepada Pengguna Aplikasi e-Procurement diantaranya PPK, Pejabat Pengadaan, ULP, Pokja, admin SKPD dan penyedia sehingga informasi tersebut dapat segera diketahui oleh Pengguna Aplikasi e-Procurement dan dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan/kebijakan yang ada. Apabila terdapat perubahan aturan/kebijakan yang berkenaan dengan Pengadaaan/Barang Jasa dan juga perubahan Aplikasi E-Procurement maka menjadi satu kewajiban untuk menyampaikan informasi tersebut kepada pengguna LPSE.

#### **5. Bimbingan Teknis *E-Procurement***

Bimbingan Teknis *e-Procurement* dilakukan untuk member Pelatihan/Bimbingan Teknis Aplikasi kepada Pengguna Aplikasi e-Procurement agar para pengguna Aplikasi dapat mengoperasikan/menggunakan Aplikasi e-Procurement secara baik dan benar pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik**

Pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu dalam 5 tahun ke depan memiliki peran yang strategis sebagai pusat data center dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga perlu adanya persiapan dalam beberapa hal baik dalam penyediaan perangkat keras maupun lunak dalam menghadapi tantangan pengembangan layanan TIK. Untuk mewujudkan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagai pusat data center di Kabupaten Kapuas Hulu tentu saja perlu dorongan *good will* dari pimpinan dan *stake holder* lainnya untuk dapat mengimplementasikan rencana strategis disamping juga memberikan SDM yang mampu mengaplikasikan TIK tersebut.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sesuai dengan tupoksinya merupakan lembaga teknis daerah yang cukup strategis

dalam menentukan kebijakan program pengembangan bidang komunikasi dan informatika di daerah, agar Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dapat menjalankan tupoksinya, maka diperlukan faktor-faktor pendukung yang merupakan peluang dan tantangan.

Beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam menjalankan tupoksi, yaitu:

**a. Tantangan**

1. Globalisasi informasi yang berdampak pada kebutuhan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi serta keterbukaan informasi publik;
2. Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
3. Ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang belum merata;
4. Perlunya membuka jalur akses informasi pada beberapa kegiatan dan organisasi perangkat daerah, sehingga tupoksi penyebarluasan informasi pembangunan yang tercermin dari realisasi kegiatan OPD dapat dipublikasikan secara optimal;
5. Adanya tuntutan masyarakat akan Pemberian informasi layanan publik yang cepat, tepat dan akurat;
6. Keinginan masyarakat akan adanya peningkatan keamanan informasi dan kerjasama dengan pihak penyedia jasa *collocation server*;
7. Perlunya membuka jalur akses informasi pada beberapa kegiatan dan organisasi perangkat daerah, sehingga tupoksi penyebarluasan informasi pembangunan yang tercermin dari realisasi kegiatan OPD dapat dipublikasi secara optimal;
8. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas pengumpulan informasi secara komprehensif sehingga layanan informasi yang lengkap terhadap masyarakat dapat terpenuhi.

**b. Peluang**

1. Kabupaten Kapuas Hulu Merupakan Kabupaten terdepan yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, hal ini memberikan dampak positif karena mendorong kementerian-kementerian untuk mendukung program nawacita Membangun

- Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
2. Dukungan aparat pemerintah terhadap keterbukaan informasi yang semakin meningkat;
  3. Kebutuhan pengembangan muatan *e-Government* ;
  4. Kesadaran dan Kebutuhan masyarakat akan pentingnya informasi;
  5. Wawasan dan pengetahuan masyarakat semakin meningkat;
  6. Adanya regulasi dari pemerintah pusat yang mendukung pengembangan komunikasi dan informatika;
  7. Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan;
  8. Sikap positif dari pengguna Aplikasi yang ada pada LPSE Kabupaten Kapuas Hulu.

### **BAB III**

## **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik**

Pada pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika saat ini telah memasuki era reformasi artinya masyarakat telah menuntut adanya transparansi dan keterbukaan serta keberpihakan kepada masyarakat khususnya yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan daerah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung keterlibatan publik dalam pelaksanaan pembangunan, yang salah satunya adalah fasilitasi informasi publik melalui website. Hal ini telah sejalan dengan komitmen pemerintah terkait dengan pembangunan *e-Government* sebagaimana yang terdapat dalam intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional *e-Government*.

Berdasarkan hal tersebut maka pengembangan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien yang meliputi :

- Pengolahan Data
- Pengelolaan Informasi
- Sistem Manajemen
- Proses Kerja

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yaitu :

1. Sarana dan prasarana yang masih terbatas dan belum memadai, utamanya sarana atau infrastruktur pendukung komunikasi, informatika pada lapisan masyarakat, sehingga banyak desa di

Kabupaten Kapuas Hulu yang belum terjangkau penyebaran informasi atau *Blank Spot*.

2. Terbatasnya dana/anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan
3. Pengelolaan sarana komunikasi dan informasi seperti media siaran LPPL Rasika FM masih sangat terbatas baik dari jangkauan siaran maupun ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.
4. Masih rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap manfaat dan pentingnya informasi dalam kehidupan.
5. Kurangnya Sumber Daya Manusia sebagai *trainer* dalam penggunaan Aplikasi kepada Pengguna LPSE sehingga harus mendatangkan Pelatih/Narasumber dari luar.
6. Rencana Umum Pengadaan yang seharusnya *diinput* dan diumumkan pada aplikasi SiRUP belum sepenuhnya dilaksanakan oleh setiap SKPD akibatnya masih ada perbedaan RUP pada Aplikasi dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang ada pada masing-masing SKPD.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Penyusunan Rencana Strategis SKPD ( RENSTRA - SKPD ) merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu sehingga semua langkah - langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Perhubungan kabupaten Kapuas Hulu sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 - 2021. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih :

**“MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA,  
BERDAYA SAING DAN HARMONIS”.**

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih :

- 1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;**
- 2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada sumber daya daerah yang berkelanjutan;**
- 3. Meningkatkan layanan infrastruktur dasar dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.**

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra**

Rencana Strategis ( Renstra ) disusun berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan bahwa setiap Kementerian / Lembaga diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian / Lembaga ( Renstra K / L ), yang merupakan dokumen perencanaan kementerian / lembaga untuk periode 5 ( lima ) tahun.

Renstra memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian / lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif.

### **3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Adapun beberapa isu strategis pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan isu strategis Nasional adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten Kapuas Hulu Merupakan Kabupaten terdepan yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, hal ini memberikan dampak positif karena mendorong kementerian-kementerian untuk mendukung program nawacita Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
2. Deklarasi Anti Hoax merupakan gerakan yang di prakarsai oleh Kementrian Komunikasi Informatika yang mana tujuannya memerangiberita bohong yang diproduksi dan tersebar di media online dan media sosial yang menyebabkan pertengkaran, saling membenci dapat di kikis dengan kedewasaan, dengan pendidikan, cek and ricek mana berita online yang terpercaya mana yang jangan terlalu di percaya sehingga menjadi dewasa, karena masalah yang dihadapi sekarang ini di masyarakat adalah bukan mencari informasi tapi memilah informasi, mana yang aktual, fakta dan terpercaya. Pendidikan memilah informasi, mana yang aktual, fakta dan terpercaya merupakan salah satu aspek pendidikan yang di laksanakan dalam sosialisasi penggunaan Internet Sehat.

3. Penggunaan *E-Government* dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. *E-Government* diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis. Pada intinya *E-Government* adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara Pemerintah dan pihak-pihak lain.
4. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang diluncurkan pada 31 Desember 2015 memberikan dampak signifikan pada Kabupaten Kapuas Hulu yang mana merupakan Kabupaten terdepan yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia. Keseriusan Pemerintah Pusat akan pentingnya MEA ditandai dengan salah satunya Pembangunan PLB (Pos Lintas Batas) Badau.
5. Industri UMKM yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu dapat didorong dengan trend yang berkembang di masyarakat berupa pemanfaatan *E-commerce* dalam memasarkan produk-produk asli Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pengelolaan dan penyediaan akses informasi dan komunikasi publik dalam mendukung kebijakan daerah.

**BAB IV**  
**VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,**  
**STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

**4.1. VISIDAN MISIDINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STTISTIK**

**a. Visi**

Visi merupakan cara pandang perencanaan strategis yang dirumuskan sebagai gambaran tentang jauh kedepan tentang kondisi ideal yang ingin dicapai serta memberikan arah dan tujuan dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu, sekaligus merupakan spirit yang mendorong organisasi agar selalu termotivasi mencapai kondisi ideal yang diharapkan.

Penetapan visi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu berlandaskan pada tugas pokok dan fungsi dinas yaitu Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika dan Bidang Statistik yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Berdasarkan uraian di atas, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu, telah menetapkan **visi** sebagai berikut :

***"Terwujudnya Masyarakat Informatif dan Berdaya Saing Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Mendukung dan Mewujudkan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu"***

**1. Penjelasan Visi**

- a. Masyarakat Informatif artinya masyarakat yang sudah menyadari, memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengakses dan memanfaatkan serta menyebarkan informasi, dan menjadikan informasi sebagai nilai tambah dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.
- b. Masyarakat yang berdaya saing artinya masyarakat memiliki kemampuan, dan atau kekuatan, berdasarkan potensi yang

ada untuk bersaing, memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Dalam konteks pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu maka produk yang dihasilkan harus dapat unggul secara kualitas, efisien proses produksi dan dapat bersaing di tingkat regional, nasional dan internasional.

**b. Misi**

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi di atas, maka disusunlah misi yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pelayanan sarana dan prasarana pembangunan komunikasi dan informatika untuk memperluas aksesibilitas masyarakat terhadap informasi dalam rangka mengurangi kesenjangan informasi;
2. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan serta pemberdayaan lembaga komunikasi dan informatika pemerintah dan masyarakat;
3. Mendorong peranan media massa dalam rangka meningkatkan informasi yang beretika dan bertanggung jawab serta memberikan nilai tambah pembangunan;
4. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan literasi dan profesionalisme;
5. Membangun sistem informasi pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
6. Menyediakan layanan yang aman berkualitas dan terstandarisasi kepada pengguna Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

**4.2. Tujuan dan Sasaran**

**a. Tujuan**

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan mengenai hal-hal yang akan dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi sebagai jawaban terhadap isu-isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah yang sedang dan akan dihadapi.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2016 – 2021 yaitu :

1. Meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik.
2. Meningkatkan layanan, pemanfaatan infrastruktur TIK
3. Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas melalui pemanfaatan TIK.
4. Meningkatkan Infrastruktur Pendukung Pemerataan dan keseimbangan Pembangunan (infrastruktur informasi)
5. Meningkatkan layanan Pengguna Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

**b. Sasaran**

Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari setiap tujuan yang diimplementasikan kedalam suatu bentuk program / kegiatan. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2016 – 2021 yaitu :

1. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui jaringan komunikasi dan informatika
2. Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK serta layanan publik
3. Meningkatnya Kualitas manajemen Pelayanan Publik
4. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur informasi publik
5. Meningkatnya Pengumpulan data RUP dan Pengguna Aplikasi *E-Procurement* serta Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

**4.3. Strategi dan Kebijakan**

**a. Strategi**

Strategi adalah langkah-langkah yang akan dilakukan dan berisi program-program indikatif guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Untuk mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran misi

tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan yang mengacu pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2016–2021.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dengan dipertegas adanya arah kebijakan. Adapun strategi yang akan dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu dari setiap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai adalah :

1. Meningkatkan pemberdayaan potensi dan lembaga komunikasi masyarakat dalam menghadapi globalisasi dan keterbukaan informasi.
2. Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi TIK dalam rangka mengembangkan muatan *e-government* dan kualitas pelayanan publik didukung sarana dan prasarana yang memadai dan SDM professional.
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang cepat, Berkekuatan Hukum, Nyaman, Aman, Jelas dan Terjangkau.
4. Meningkatnya Layanan Jangkauan, dan Akses Masyarakat terhadap informasi publik termasuk konten yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat diterima tepat waktu.

#### **b. Kebijakan**

Kebijakan adalah arah tindakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan. Berdasarkan hal tersebut maka kebijakan dari setiap tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan konsep reformasi birokrasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kontrol masyarakat, untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih jelas tolok ukurnya.
2. Peningkatan efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat pelayanan publik
3. Peningkatan kualitas Pelayanan Publik sesuai Harapan dan Kebutuhan Masyarakat.
4. Kebijakan dari tujuan keempat adalah :

- a. Perluasan jangkauan Radio LPPL Rasika FM melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi terbaru
- b. Peningkatan dan fasilitasi penyediaan akses Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan infrastrukturnya sebagai fasilitasi publik.

Lebih jelas mengenai tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1

**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan pengetahuan, pemberdayaan, dan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui jaringan komunikasi dan informatika	Meningkatkan pemberdayaan potensi dan lembaga komunikasi masyarakat dalam menghadapi globalisasi dan keterbukaan informasi	Pengembangan konsep reformasi birokrasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kontrol masyarakat, untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih jelas tolok ukurnya.
Meningkatkan layanan, pemanfaatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi(TIK)	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK serta layanan publik	Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi TIK dalam rangka mengembangkan muatan <i>e-government</i> dan kualitas pelayanan publik didukung sarana dan prasarana yang memadai dan SDM professional	Peningkatan efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat pelayanan publik
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas	Meningkatkan Kualitas	Peningkatan kualitas Pelayanan Publik

yang berkualitas	manajemen Pelayanan Publik	Pelayanan Publik yang cepat, Berkekuatan Hukum, Nyaman, Aman, Jelas dan Terjangkau	sesuai Harapan dan Kebutuhan Masyarakat
Meningkatkan Infrastruktur Pendukung Pemerataan dan keseimbangan Pembangunan	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Informasi Publik	Meningkatnya Layanan Jangkauan, dan Akses Masyarakat terhadap informasi publik termasuk konten yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat diterima tepat waktu	1. Perluasan jangkauan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Rasika FM melalui Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Terbaru 2. Peningkatan dan Fasilitasi Penyediaan Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Infrastrukturnya sebagai Fasilitas Publik

**BAB V**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR**  
**KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN**  
**PENDANAAN INDIKATIF**

**5.1. Program dan Kegiatan**

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategis, maka langkah operasional yang dilakukan adalah menuangkan ke dalam beberapa program dan kegiatan beserta kebutuhan pendanaan secara indikatif dan bertahap selama lima tahun.

Program adalah bentuk dari suatu instrument kebijakan yang berisi beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang telah direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu periode 2016-2021 yang merupakan tindakan nyata yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan semaksimal mungkin.

Selanjutnya pada program dan kegiatan haruslah memiliki alat ukur yang jelas dan dibuat guna melilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pada suatu program dan kegiatan yang disebut dengan indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan dari suatu program dan kegiatan baik secara kualitatif (tolak ukur) maupun kuantitatif (target kinerja) yang secara khusus dinyatakan sebagai bentuk pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat pemantauan atau evaluasi.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi akan melaksanakan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah disusun dan direncanakan dalam Renstra. Adapun program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu yang direncanakan berdasarkan sasaran pembangunan pada tahun 2018, adalah sebagai berikut :

**1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor
- f. Kegiatan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- g. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
- h. Kegiatan Barang Cetakan dan Penggandaan
- i. Kegiatan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- j. Kegiatan Penyediaan dan Perlengkapan Kantor
- k. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- l. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- m. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
- n. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
- o. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan / Pengawasan Dalam Daerah
- p. Kegiatan Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang/ Jasa
- q. Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Kantor
- r. Kegiatan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan SKPD
- s. Kegiatan Penyediaan Jasa Publikasi

**2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- a. Kegiatan Pengadaan Mobil Dinas
- b. Kegiatan Pengadaan Peralatan Perlengkapan Kantor
- c. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
- d. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional
- e. Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Rumah Gedung Kantor
- f. Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Kendaraan Dinas / Operasional

- g. Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Rumah Gedung Kantor Radio LPPL Rasika Kab. Kapuas Hulu

**3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

- a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
- b. Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
- c. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

**4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

- a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
- b. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

**5. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**

- a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
- c. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
- d. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- e. Kegiatan Penyusunan RKA , DPA dan DPA Perubahan SKPD
- f. Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD

**6. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**

- a. Kegiatan Peliputan dan Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu
- b. Kegiatan Penyebarluasan Informasi pembangunan daerah melalui LPPL Rasika FM
- c. Kegiatan Pengadaan alat studio dan komunikasi
- d. Kegiatan Peningkatan Jangkauan Frekuensi Siaran Radio LPPL - Rasika-FM Kapuas Hulu
- e. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Website Dinas Kominfo dan Statistik Kab. Kapuas Hulu
- f. Pengembangan media siaran LPPL Rasika FM melalui *protocol streaming*
- g. Kegiatan dokumentasi berbasis data digital pada kegiatan Diskominfo dan Statistik Kab. Kapuas Hulu

- h. Kegiatan Desiminasi Informasi Melalui Televisi (Videotron)
- i. Kegiatan pembuatan profil Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Kapuas Hulu
- j. Kegiatan pengelolaan dan pengembangan website Kabupaten Kapuas Hulu
- k. Kegiatan pembuatan Website Kecamatan
- l. Kegiatan pengelolaan dan pengembangan Website Kecamatan di Kab. Kapuas Hulu
- m. Kegiatan Desiminasi Informasi melalui perangkat videotron
- n. Kegiatan penyebarluasan informasi melalui Pusat Kreatif Produktif (PKP)

**7. Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi**

- a. Kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
- b. Kegiatan Desiminasi Informasi Media Tradisional (Metra) melalui Pertunjukan Rakyat
- c. Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Singkat Tentang Jurnalistik untuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
- d. Kegiatan Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
- e. Kegiatan Pelatihan Singkat Tentang Komunikasi dan Media Publik untuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
- f. Kegiatan Sosialisasi Sistem Peyebarluasan Informasi Melalui SMS Broadcast, SMS Centre dan SMS Gateway
- g. Kegiatan Sosialisasi manfaat dan bahaya penggunaan Komunikasi dan Informasi di Media Publik
- h. Kegiatan Sosialisasi Internet Sehat
- i. Kegiatan Sosialisasi Internet Kecamatan
- j. Kegiatan sosialisasi Aplikasi *E-Procurement*

**8. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa**

- a. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Kab. Kapuas Hulu
- b. Kegiatan Penyebarluasan Informasi atau himbauan melalui Baleho, Spanduk atau Pamplet

**9. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi**

- a. Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik
- b. Kegiatan Pembinaan dan Penyebarluasan Informasi melalui *Mobile Community Access Point (M-CAP)*
- c. Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan *E-Government* Kabupaten Kapuas Hulu
- d. Kegiatan Pengelolaan dan Pengoperasional Media Center
- e. Kegiatan Pendayagunaan dan Pengembangan Aplikasi SIMAYA
- f. Kegiatan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kab. Kapuas Hulu
- g. Kegiatan Monitorin dan Evaluasi Penggunaan Aplikasi SIRUP dan SPSE di Kecamatan dan SKPD
- h. Kegiatan Pemuktahiran data RUP dan Pengguna Aplikasi *E-Procurement* pada LPSE Kab. Kapuas Hulu

**10. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi**

- a. Kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Program Teknologi Komunikasi dan Informasi
- b. Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Jaringan Telekomunikasi
- c. Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Internet Desa dan Broadband

**11. Program Pengembangan Data dan Informasi**

- a. Kegiatan Penyusunan Data Pokok Kabupaten Kapuas Hulu
- b. Kegiatan Survey Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu
- c. Kegiatan Survey Statistik Dasar Kabupaten Kapuas Hulu
- d. Kegiatan Sosialisasi Tugas dan Fungsi petugas Pengumpulan Data
- e. Kegiatan Pengumpulan Data Pokok di Semua Sektor
- f. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengumpulan Data Pokok di Kabupaten, Kecamatan dan Desa
- g. Kegiatan Pencetakan buku Data Pokok Kab. Kapuas Hulu
- h. Kegiatan Penyebaran Buku Data Pokok Kab. Kapuas Hulu dan Pemerintahan Kab. Kapuas Hulu

Untuk lebih jelas mengenai program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas

Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada lampiran I.

## **BAB VI PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021 ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu yang memuat tentang program, kegiatan dan kebijakan serta tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama lima tahun ke depan. Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021 merupakan penjabaran dan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang disusun atas dasar visi dan misi yang jelas dan tepat dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

Di dalam renstra terdapat program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik selama lima tahun ke depan sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021 yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dari tahun 2016 hingga tahun 2021 sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan daerah oleh masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu. Renstra disusun dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat strategis, namun disadari masih banyak terdapat hambatan dan kekurangan. Untuk itu masukan, saran, pendapat serta kritikan yang sifatnya membangun sangat diharapkan, sebagai bahan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Strategis (Renstra) ini dapat dijadikan media yang paling efektif untuk mewujudkan *good governance* di era globalisasi. Dengan demikian kesungguhan dalam menyusun Renstra ini dan pelaksanaannya menunjukkan komitmen yang kuat bagi seluruh jajaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja kepada masyarakat.

Dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 – 2021 diharapkan menjadi koridor pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat mencapai target sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Akhirnya, semoga Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu ini dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah dirumuskan secara konsisten dalam rangka mewujudkan *good governancedi* Kabupaten Kapuas Hulu.

**Putussibau, April 2017**  
**Plt. Kepala Dinas**  
**Komunikasi, Informatika dan Statistik**  
**Kabupaten Kapuas Hulu,**

**H.SARBANI, S.E., M.A.P**  
**Pembina UtamaMuda(IV/c)**  
**NIP. 19610415 198608 1 003**

RENSTRA 2016 - 2021

---

## DAFTAR ISI

		halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....		i
<b>DAFTAR ISI</b> .....		ii
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
	I.1. Latar Belakang .....	1
	I.2. Landasan Hukum .....	3
	1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
	1.4. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK</b> .....	7
	2.1. Tugas Pokok dan Fungsi .....	7
	2.2. Sumber Daya .....	14
	2.3. Kinerja Pelayanan .....	16
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .....	25
<b>BAB III</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b>	13
	3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan .....	27
	3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	36
	3.3. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika	42
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	43
	3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	45
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	47
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik .....	47
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	49

	5.1 Strategi dan Kebijakan Prioritas .....	49
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	51
	6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik .....	51
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	54
	7.1 Indikator Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	54
BAB VIII	PENUTUP .....	56

## DAFTAR TABEL

		halaman
<b>TABEL 1 Sumber Daya Dinas Komunikasi, Infoematika dan Statistik .....</b>		15
<b>DAFTAR ISI .....</b>		ii
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN .....</b>	1
	1.1. Latar Belakang .....	1
	1.2. Landasan Hukum .....	3
	1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
	1.4. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK.....</b>	7
	2.1. Tugas Pokok dan Fungsi .....	7
	2.2. Sumber Daya .....	14
	2.3. Kinerja Pelayanan .....	16
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .....	25
<b>BAB III</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b>	13
	3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan .....	27
	3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	36
	3.3. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika	42
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	43
	3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	45
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	47
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik .....	47
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	49

	5.1 Strategi dan Kebijakan Prioritas .....	49
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	51
	6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik .....	51
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	54
	7.1 Indikator Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	54
BAB VIII	PENUTUP .....	56

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang begitu pesat telah mengiringi proses perubahan tatanan dunia dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa batas. Pesatnya informasi global kini tidak hanya merambah di wilayah perkotaan saja, tetapi telah sampai ke pelosok pedesaan sehingga mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat yaitu masih adanya kesenjangan dalam bidang informasi dan komunikasi yang disebabkan oleh keberagaman tingkat pendidikan masyarakat, budaya, dan kondisi geografis serta ketersediaan infrastruktur. Kondisi demikian tentu menjadi tugas negara dalam hal ini pemerintah untuk memfasilitasinya dalam rangka mengurangi kesenjangan tersebut sehingga masyarakat mudah memperoleh informasi yakni melakukan pemerataan infrastruktur, pendayagunaan media informasi dan pemberdayaan lembaga komunikasi masyarakat.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu merupakan OPD baru di Kabupaten Kapuas Hulu yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 60 Tahun 2016. Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi penyebarluasan informasi, pengembangan dan pendayagunaan TIK dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di bidang kominfo yang dilaksanakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik maka diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informatika, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta implementasi *e-government* dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Kabupaten Kapuas Hulu.

*E-government* yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif, merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur dan sumberdaya aparatur sebagai pelayan masyarakat.

Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat, mudah dan akurat. Oleh karena itu, untuk mendukung kebutuhan tersebut perlu manajemen pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung jaringan informasi dan komunikasi yang mencakup semua SKPD.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan tugas menjalankan sebagian urusan daerah dibidang informasi yang berbasis Teknologi Informatika dan Komunikasi, disamping beban tugas lain yang diberikan atasan langsung sesuai bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka dibutuhkan suatu perencanaan sebagai arah kebijakan dan sasaran yang akan dituju. Dalam hal ini, ada 2 (dua) perencanaan yang harus dilakukan, yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

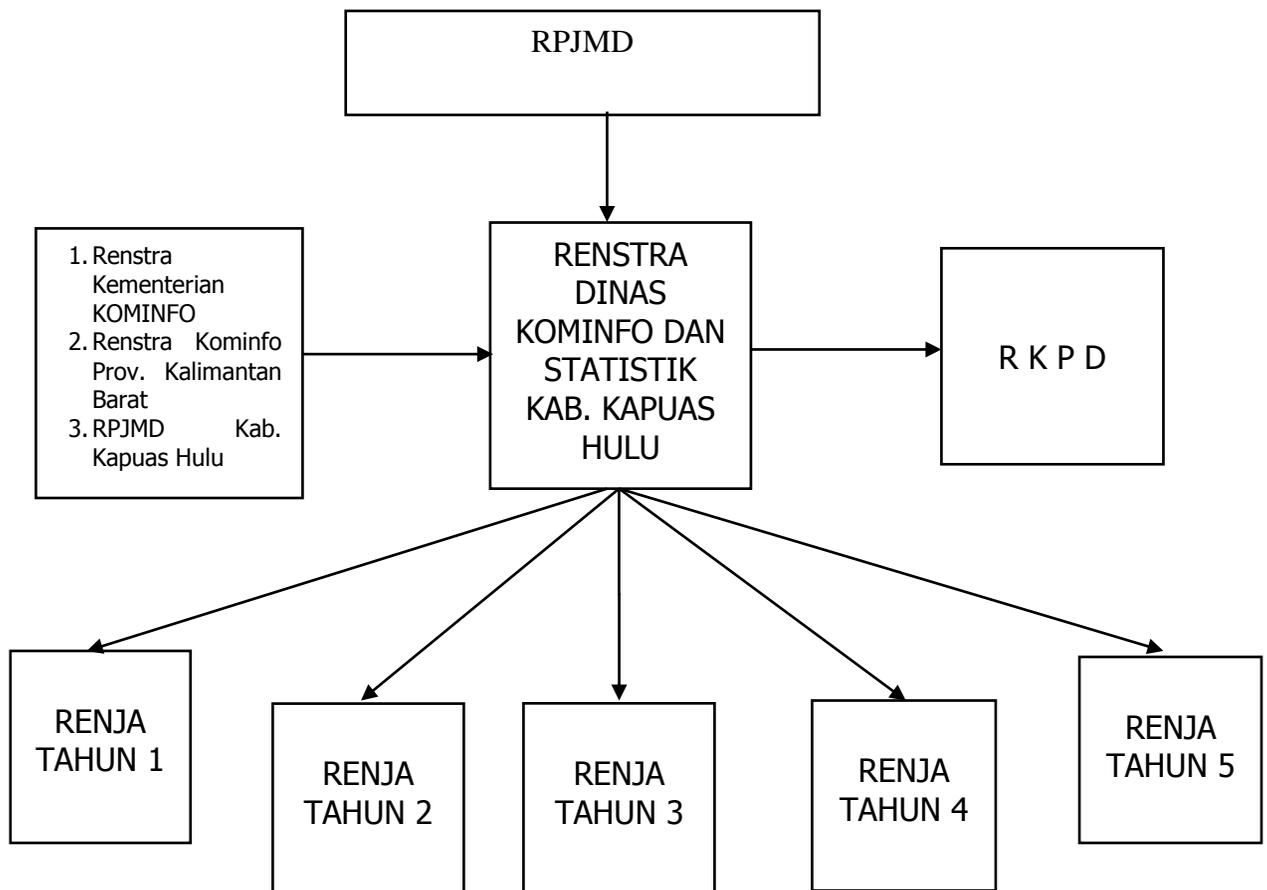
Renstra adalah sebuah dokumen resmi pemerintah daerah yang dibutuhkan sebagai pengarah dalam pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara khusus dan pembangunan daerah pada umumnya dalam masa waktu 5 (lima) tahun Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Renstra disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu 2016-2021, sekaligus untuk mendukung tercapainya Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu terpilih yaitu; **Menuju Kapuas Hulu yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing dan Harmonis”**

Dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu ini juga berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2016 – 2021 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 juga telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Visi, Misi, tujuan strategis dan kebijakan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Berkaitan dengan hal ini, dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu, kaitannya dengan dokumen perencanaan yang lain sebagaimana terlihat pada gambar 1.1.

**Gambar 1.1**  
**Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan**



## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

4. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten kapuas Hulu 2011-2015;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu atau sebagai penentu arah dari pelaksanaan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan 5 (lima) tahun ke depan. Tujuannya jelas, yaitu tercapainya sasaran

pembangunan sesuai target yang telah ditentukan.

b. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Selatan ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dalam menyusun program kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja tahunan agar lebih terarah, fokus dan sesuai dengan Renstra, sekaligus sebagai alat untuk menjaga keseimbangan program kerja 5 (lima) tahun kedepan.
2. Mewujudkan sinergitas antar unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu terhadap program dan kegiatan tahun 2016 - 2021.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu ini ditulis dengan sistematika penulisan.

##### **Bab I: PENDAHULUAN**

Dalam Bab Pendahuluan ini diantaranya berisikan Latar Belakang Penulisan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu, yang juga berisikan tentang maksud dan tujuannya serta sistematika penulisan dari Renstra ini.

##### **Bab II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.**

Dalam Bab II ini berisikan tentang tugas, fungsi dan struktur dari Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu. Selain itu juga terdapat informasi tentang Sumber Daya Manusia dan aset pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik serta uraian tentang kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. Dan juga paparan mengenai Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.

##### **BAB III: PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KAB. KAPUAS HULU.**

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu memuat tentang Identifikasi Permasalahan berdasarkan

Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-isu Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

#### **BAB IV: TUJUAN DAN SASARAN**

BAB IV ini memaparkan tentang, tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.

#### **BAB V: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini memaparkan tentang strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu yang dibuat dalam bentuk tabel berisikan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan.

#### **BAB VI: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini memaparkan tentang rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.

#### **BAB VII: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Bab ini berisikan indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2016-2021.

#### **BAB VII: PENUTUP**

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**  
**KABUPATEN KAPUAS HULU**

**2.1 Tugas Pokok dan Fungsi**

Sebagai Perangkat Daerah yang baru di Kabupaten Kapuas Hulu, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

**a. Tugas Pokok**

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas pokok yaitu **“Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika dan Bidang Statistik yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu”**.

**b. Fungsi Organisasi**

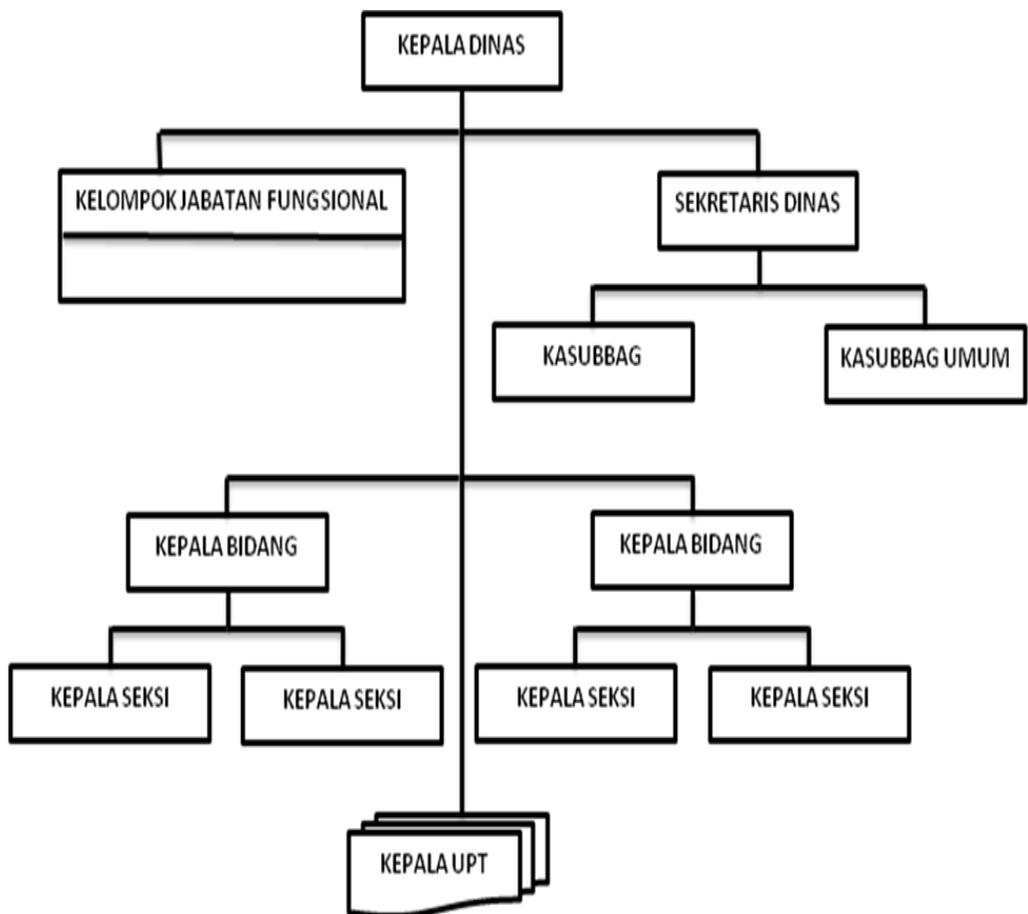
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika dan statistik;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika dan statistik;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika dan statistik;
4. Pelaksanaan administrasi dinas;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### c. Struktur Organisasi

Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu, sebagai berikut :

#### STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMINFO DAN STTISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU



#### KEPALA DINAS

##### Tugas pokok :

Memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Dinas Komunikas, Informatika dan Statistik sesuai dengan kewenangan di bidang komunikasi, Informatika dan Statistik.

##### Fungsi :

1. Penetapan rencana strategis Dinas Komunikasi, Informatika;
2. Pengkoordinasian seluruh kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan instansi lainnya;

3. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan di Bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik;
4. Pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan rencana operasional dan kebijakan yang telah ditetapkan;
5. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan dibidang Komunikasi, Informatika dan Statistik;
6. Pemantauan, pengawasan dan perkembangan pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika secara periodik;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

### **SEKRETARIS**

#### **Tugas Pokok :**

1. Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan administrasi dan teknis operasional
2. Memberikan pelayanan administrasi urusan keuangan, perencanaan dan umum, aset dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas.

#### **Fungsi :**

1. Penyusunan program kerja Sekretariat;
2. Pengkoordinasian penyusunan program kerja Dinas;
3. Pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
4. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur, dan tata laksana Dinas;
5. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik Dinas;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Dinas;
7. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR**

#### **Tugas Pokok :**

Membantu sekretaris dalam pelaksanaan tugas mengumpulkan dan mengolah bahan administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik Dinas.

**Rincian Tugas :**

1. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur;
2. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pembangunan aparatur Dinas;
3. Penyelenggaraan ketatalaksanaan Dinas;
4. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga kearsipan dan perpustakaan Dinas;
5. Pengelolaan barang milik Dinas;
6. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN**

**Tugas Pokok :**

Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, pengevaluasian, dan pelaporan program kerja serta pengelolaan administrasi keuangan Dinas.

**Rincian Tugas :**

1. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
2. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan program kerja Dinas;
3. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;
4. Penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Dinas;
5. Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dari setiap Bidang dan UPT;
6. Pengendalian dan pelaporan program kerja dinas;
7. Penyelenggaraan tata usaha keuangan Dinas;
8. Penyusunan Neraca, Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas;
9. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan Dinas;
10. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Program dan Keuangan; dan
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **KEPALA BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK**

### **Tugas Pokok :**

Membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informasi publik.

### **Rincian Tugas :**

1. Penyusunan program kerja Bidang Komunikasi dan Informasi Publik;
2. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang Komunikasi dan Informasi Publik;
3. Pembinaan komunikasi dan media publik;
4. Pengelolaan informasi publik;
5. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Komunikasi dan Informasi Publik;
6. Pengevaluasian pelaksanaan seksi-seksi pada Bidang Komunikasi dan Informasi Publik;
7. Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Komunikasi dan Informasi Publik secara periodik; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## **KEPALA SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI**

### **Tugas Pokok :**

Membantu Kepala Bidang Komunikasi dan informasi publik dalam penyampaian bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan informasi publik.

### **Rincian Tugas :**

1. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Informasi;
2. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan informasi publik;
3. Pengumpulan dan pengelolaan informasi publik;
4. Pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah;
5. Pelayanan informasi publik;
6. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Informasi; dan
7. Pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **KEPALA SEKSI KOMUNIKASI DAN MEDIA PUBLIK**

### **Tugas Pokok :**

Membantu Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan komunikasi dan media publik.

### **Rincian Tugas :**

1. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Komunikasi dan Media Publik;
2. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan komunikasi dan media publik;
3. Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
4. Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
5. Penyediaan akses informasi di kabupaten;
6. Pembinaan pengelolaan media komunikasi publik;
7. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Komunikasi dan Media Publik; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **KEPALA BIDANG STATISTIK DAN APLIKASI INFORMATIKA**

### **Tugas Pokok :**

Membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika.

### **Rincian Tugas :**

1. penyusunan program kerja Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika;
2. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika;
3. pelaksanaan statistik sektoral;
4. pengelolaan aplikasi informatika;
5. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika;
6. pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika;
7. pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika secara periodik; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## **KEPALA SEKSI STATISTIK**

### **Tugas Pokok :**

Membantu Kepala Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika dalam penyampaian bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pelaksanaan statistik sektoral.

### **Rincian Tugas :**

1. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Statistik;
2. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pelaksanaan statistik sektoral;
3. pelaksanaan statistik sektoral;
4. pemberian dukungan survei skala nasional di tingkat kabupaten;
5. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Statisti; dan
6. pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **SEKSI APLIKASI INFORMATIKA**

### **Tugas Pokok :**

Membantu Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan aplikasi informatika.

### **Rincian Tugas :**

1. penyusunan rencana kegiatan Seksi Aplikasi Informatika;
2. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan Aplikasi Informatika;
3. pengelolaan nama domain serta pengelolaan *e-government* di lingkungan pemerintah daerah;
4. pemberdayaan informatika meliputi *data center*, *disaster recovery center*, Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) pengembangan internet dan penggunaan akses internet pelayanan sistem komunikasi intra pemerintah di kabupaten;
5. pengintegrasian layanan publik dan pemerintahan di kabupaten;
6. pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi di kabupaten serta pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat;
7. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Aplikasi Informatika; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik dan

Aplikasi Informatika sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **KEPALA UNIT PELAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK**

### **Tugas Pokok :**

Memimpin penyelenggaraan pelayanan pengadaan secara elektronik sesuai wewenang yang dilimpahkan dan peraturan perundang-undangan. Kepala unit berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

### **Rincian Tugas :**

1. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan layanan pengadaan secara elektronik;
2. Memfasilitasi rencana umum pengadaan (RUP);
3. Pengelolaan e-Procurement atau Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sebagai User Management untuk Aplikasi SiRUP serta Monev OL/TEPRA;
4. Menyediakan pelatihan kepada Panitia/ULP dan Penyedia barang/jasa serta pengguna lainnya;
5. Menyediakan akses internet bagi Panitia/ULP dan Penyedia barang/jasa serta pengguna lainnya;
6. Menyediakan bantuan teknis untuk mengoperasikan SPSE kepada Panitia/ULP dan Penyedia barang/jasa serta pengguna lainnya;
7. Melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap Admin Agency penyedia barang/jasa dan pengguna lainnya;

## **2.2. SUMBER DAYA SKPD**

### **a. Sumber Daya Manusia**

Jumlah pegawai di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 20 (dua puluh) orang. Sedangkan tenaga non PNS berjumlah 15 orang. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan dan Jumlah Pejabat Struktural dapat dilihat pada tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Sumber Daya Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik**

NO	ESELON/ NON ESELON	PENDIDIKAN						GOLONGAN			
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	1V	III	II	I
1.	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	III	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-
3.	IV	1	2	-	4	-	-	-	7	-	-
<b>SUB JUMLAH</b>		<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.	NON ESELON	-	4	3	3	-	-	-	7	3	-
5.	HONORER	-	2	4	9	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>4</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>-</b>

**a. Aset/Modal**

Aset dinas yang merupakan barang tidak bergerak dan bergerak serta barang perlengkapan lainnya, disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
**Kondisi Aset Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik**  
**Kabupaten Kapuas Hulu**

No	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI		KET
			Baik	Rusak	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Kendaraan Dinas (Mobil)	1	1	-	Baik
2	Kendaraan Dinas (Motor)	6	6	-	Baik
3	Studio Radio RASIKA	1	1	-	Baik
4	Kamera Foto	4	1	3	Rusak berat
5	Komputer	5	3	2	Rusak berat
6	Handycam	4	1	3	Rusak berat
7	Laptop	5	5	-	Baik
8	Genset	1	1	-	Baik
9	AC	5	5	-	Baik
10	Website	1	1	-	Baik
11	Televisi	2	2	-	Baik
12	Exciter	2	1	1	Rusak ringan
13	Projektor	1	1	-	Baik
14	Printer	3	3	-	Baik
<b>Jumlah</b>		<b>41</b>	<b>Unit</b>		

### 2.3 Kinerja Pelayanan

Urusan Komunikasi dan Informatika pada periode RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2012-2016 dikelola oleh Bidang Komunikasi dan Informatika pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu, Sehingga dalam hal ini Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu hanya dapat melaporkan Pencapaian Kinerja Pelayanan dan Anggaran serta Realisasi Pendanaan berdasarkan RFK-0 Tahun 2016. Adapun beberapa hal terkait dengan kinerja layanan dan Anggaran serta Realisasi Pendanaan yang telah dilakukan pada periode tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Bidang Komunikasi dan Informatika**  
**Kabupaten Kapuas Hulu**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
<b>Pelaksanaan Desiminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui :</b>																			
1	Media Massa seperti Radio	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
2	Media baru seperti website	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	90	-	-	-	-	90
3	Media Tradisional seperti pertunjukan rakyat	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	80	-	-	-	-	80
4	Media interpersonal seperti sarasehan dan diskusi	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	70	-	-	-	-	70
5	Media Luar Ruang seperti Buletin	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
<b>Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)</b>																			
	Jumlah Kecamatan yang memiliki Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	50	-	-	-	-	50

**Tabel 2.4**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bidang Komunikasi dan**  
**Informatika Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016**

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
<b>I</b>	<b>Belanja Langsung</b>	-	-	-	-	<b>2,124,146,900</b>	-	-	-	-	<b>100</b>	-	-	-	-	<b>100</b>		<b>2,095,833,731</b>
<b>1</b>	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>																	
	1 Pengelolaan dan Pengembangan Website Kab. Kapuas Hulu dan Website Dishubkominfo	-	-	-	-	81,591,700	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	81,591,245
	2 Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Kab. Kapuas Hulu	-	-	-	-	200,394,600	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	200,092,600
	3 Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	-	-	-	-	85,072,000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	85,072,000
	4 Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi Kab. Kapuas Hulu	-	-	-	-	164,440,100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	163,600,000
	5 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui LPPL Rasika - FM	-	-	-	-	199,515,500	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	199,015,193
	6 Pembangunan E-Gov Kab. Kapuas Hulu	-	-	-	-	302,911,600	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	296,270,225
	7 Desiminasi Informasi Media Tradisional (METRA) melalui Pertunjukan Rakyat	-	-	-	-	54,919,900	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	54,910,900
	8 Revisi PERDA Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	-	-	-	99,642,000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	99,642,000
	9 Sosialisasi Jumalis Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	-	-	-	-	99,550,000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	99,548,800
	10 Sosialisasi Internet Sehat	-	-	-	-	100,000,000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	99,954,175
<b>2</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi</b>																	
	1 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi Informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kab. Kapuas Hulu	-	-	-	-	587,332,000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	577,211,352
	2 Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Aplikasi SIRUP dan LPSE dan SKPD	-	-	-	-	27,905,500	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	27,805,500
	3 Sosialisasi Aplikasi E-Procurement	-	-	-	-	70,648,000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	65,478,641
	4 Pemutakhiran Data Pengguna E-Procurement pada LPSE Kab. Kapuas Hulu	-	-	-	-	26,224,000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	21,641,300
	5 Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	-	-	-	-	24,000,000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	23,999,800

1. Kegiatan Peningkatan Operasional Layanan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Rasika Kapuas Hulu FM sebagai media penyebarluasan informasi.

Radio Rasika FM 103,4 Mhz berdiri tahun 2002 yang dasar hukumnya berdasarkan pada Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 43 Tahun 2012. Dengan adanya aturan yang mengharuskan Radio Rasika FM 103,4 Mhz menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal (UU NO 32 TAHUN 2002 PASAL 14 (1) bahwa Lembaga Penyiaran Publik lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat, maka melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2014 sehingga LPPL Rasika memiliki badan Hukum yang jelas.

Selain Peraturan Daerah LPPL Rasika juga memiliki ijin penyiaran yang di terbitkan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Radio Rasika FM 103,4 Mhz kedudukannya dalam naungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan berada di bawah pengawasan dan pengelolaanya oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang saat ini tugas dan fungsinya keberadaan LPPL

Rasika berada pada Bidang Komunikasi dan Informasi Publik (KIP). Rekapitulasi Interaksi Balik dari Pendengar Ke Radio Rasika (Via Telepon dan SMS) Tahun 2015 – 2016 dapat dilihat pada tabel 2.5.

**Tabel 2.5**  
**Rekapitulasi Interaksi Balik dari Pendengar Ke Radio Rasika**  
**(Via Telepon dan SMS) Tahun 2015 – 2016**

Interaksi Balik dari Pendengar Ke Radio Rasika (Via Telepon dan SMS)				
No	Nama Program Siaran	Jumlah Siar	Bentuk Interaksi	Jumlah
1	Program Balas Pantun	1300	SMS/Telpon	805
2	Program Berita Kapuas Hulu	211	Jumlah Berita Yang disiarkan	270
3	Program Dangdut Sore	3806	SMS/Telpon	2296
4	Program Dapur Kita	260	Materi Yang disiarkan	140
5	Program Dendang Melayu	972	SMS/Telpon	637
6	Program Dunia Anak	156	Materi Yang disiarkan	112
7	Program Dunia Kerja	183	Materi Yang disiarkan	154
8	Program Dunia Kesehatan	52	Materi Yang disiarkan	31
9	Pembangunan Kapuas Hulu	255	Materi Yang disiarkan	176
10	Informasi Wanita	156	Materi Yang disiarkan	112
11	Program Kisah Inspiratif	97	Materi Yang disiarkan	91
12	Subak Barik	52	Materi Yang disiarkan	28
13	Program Lagu Ngulak	1018	SMS/Telpon	623
14	Katolik	780	Lagu Yang diputarkan	420
15	Kristen	780	Lagu Yang diputarkan	420
16	Program Musik By SMS	1590	SMS/Telpon	987
17	Pekan	2254	SMS/Telpon	1106
18	Program Musik Daerah	1254	SMS/Telpon	763
19	Program Musik Islami	502	Lagu Yang diputarkan	284
20	Program Musik Lawas	1085	SMS/Telpon	686
21	Minggu	1040	SMS/Telpon	708

22	Program Musik Tetangga	1040	SMS/Telpon	721
23	Program Mutiara Malam	285	Lagu Yang diputarkan	112
24	Program Ramalan Bintang	52	Lagu Yang diputarkan	28
25	Permasalahannya	255	Lagu Yang diputarkan	96
26	Program Sahabat Rasika	1998	SMS/Telpon	723
27	Budaya Daerah	134	Lagu Yang diputarkan	91
28	Program Selamat Pagi Uncak Kapuas	185	Lagu Yang diputarkan	133
29	Program SPUK Uncak Kapuas	758	Lagu Yang diputarkan	672
29	Program Tahukah Anda	52	Lagu Yang diputarkan/SMS/Telpon	31
30	Rasika	1596	Lagu Yang diputarkan	950
31	Program Voice Of Islam	48	Lagu Yang diputarkan	28

2. Kegiatan Peningkatan Jangkauan Penerimaan Frekuensi LPPL Radio Rasika FM Kabupaten Kapuas Hulu.

Jangkauan Penerimaan LPPL Rasika FM Kabupaten Kapuas Hulu belum menjangkau 23 Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu maka perlu adanya peningkatan Kapasitas Frekuensi Penerimaan Siaran LPPL Radio Rasika Kabupaten Kapuas Hulu agar bisa menjangkau ke 32 Kecamatan.

Berdasarkan Hasil Montoring Penerima Jangkauan Frekuensi LPPL Rasika Kecamatan yang menerima Jangkauan frekuensi LPPL Rasika FM sebanyak 10 Kecamatan dan yang belum menerima Jangkauan Penerimaan Frekuensi LPPL Rasika FM sebanyak 13 Kecamatan, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.6

**Tabel 2.6**  
**Data Penerimaan /Tidak Menerima Jangkauan Frekuensi Siaran**  
**LPPL Rasika Kabupaten Kapuas Hulu**

NO	Kecamatan yang menerima Jangkauan Frekuensi LPPL Rasika	NO	Kecamatan yang tidak menerima Jangkauan Frekuensi LPPL Rasika
1.	Putussibau utara	1.	Embaloh hulu
2.	Putussibau selatan	2.	Badau
3.	Kalis	3.	Empanang
4.	Bika	4.	Puring kencana
5.	Mentebah	5.	Seberuang
6.	Bunut hilir	6.	Semitau
7.	Embaloh hilir	7.	Silat hilir
8.	Batang lupar	8.	Silat hulu
9.	Bunut hulu	9.	Jongkong
10.	Pengkadan	10.	Selimbau
11.	Boyan tanjung	11.	Suhaid
12.	Hulu gurung		
<b>JUMLAH 23 KECAMATAN</b>			

3. Dokumentasi kegiatan pembangunan daerah.

Kegiatan Dokumentasi pembangunan daerah merupakan rangkaian kegiatan pencarian informasi, pengolahan sampai dengan pendokumentasian dalam bentuk penerbitan Buletin Uncak Kapuas yang dilaksanakan 4 (empat) kali terbit dalam setahun.

4. Kegiatan Pembentukan dan pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat

Dalam pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Hingga tahun 2017 KIM yang sudah dibentuk sebanyak 14 KIM. Nama-nama Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kabupaten Kapuas Hulu yang sudah terbentuk dapat dilihat pada tabel 2.7.

**Tabel 2.7**  
**Nama – nama Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)**  
**Kabupaten Kapuas Hulu yang Sudah Terbentuk**

NO	NAMA KIM	DESA	KECAMATAN	KETERANGAN
1	Ketam Bersatu	Sungai Besar	Bunut Hulu	Sudah Di Bantu Akses Internet Dan Radio Monitor
2	Nandang Pasulang	Tekudak	Kalis	Sudah Di Bantu Akses Internet Dan Radio Monitor
3	Saridan	Sebintang	Kalis	Sudah Di Bantu Radio Monitor
4	Nandang Tekalong	Tekalong	Mentebah	Sudah Di Bantu Akses Internet Dan Radio Monitor
5	Dengah	Tanjung Karang	Putussibau Utara	Sudah Di Bantu Radio Monitor
6	Sekilas Info	Tanjung Jati	Putussibau Selatan	2 Juni 2015 Sudah Di Bantu Akses Internet Dan Radio Monitor
7	Bukit Biru	Sejiram	Seberuang	Sudah Di Bantu Radio Monitor
8	Kedaung Mahkota Info	Nibung	Selimbau	Belum Mendapat Bantuan
9	Sura Dirja	Bunut Hulu	Bunut Hilir	Sudah Di Bantu Akses Internet
10	Piasak Info	Piasak Hilir	Piasak Hilir	Sudah Di Bantu Akses Internet
11	Dangona Banuaka	Ulak Pauk	Embaloh Hulu	Belum Mendapat Bantuan
12	Podi Informatika	Martadana	Pengkadan	Belum Mendapat Bantuan
13.	Amkers Mania	Kelakar	Hulu Gurung	Belum Mendapat Bantuan
14	Ampam Informatika	Permata	Pengkadan	Belum Mendapat Bantuan

5. Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Website Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu. Fungsi paling dasar dari website yang ingin dimanfaatkan oleh

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai media informasi dan komunikasi dari dan kepada publik. Di level kedua, fungsi website yang ingin di manfaatkan adalah agar menjadi media interaktif keterhubungan dengan lembaga/instansi lain. Tingkat berikutnya website dibangun untuk memberikan transaksi pelayanan publik.

Secara umum, Kabupaten Kapuas Hulu telah memiliki website utama yaitu: [www.kapuashulukab.go.id](http://www.kapuashulukab.go.id), dengan beberapa sub domain website SKPD. Oleh Karena itu, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu sebagai salah satu leading sector pengembangan teknologi komunikasi dan informasi pemerintah dirasa sangat perlu untuk membuat, dan mengembangkan website dengan domain: [www.komifo.kapuashulukab.go.id](http://www.komifo.kapuashulukab.go.id).

Pencanangan website [www.komifo.kapuashulukab.go.id](http://www.komifo.kapuashulukab.go.id) adalah untuk memenuhi fungsi komunikasi dan penyediaan informasi kepada publik, membangun citra positif, menjalin hubungan online/ dalam jaringan interaktif dengan lembaga/instansi lain, serta dapat berintegrasi dengan aplikasi pelayanan pemerintah/publik yang telah ada maupun yang akan ada.

6. Kegiatan Pembinaan Program Desa Teknologi Komunikasi dan Informasi. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pembinaan, monitoring dan evaluasi desa-desa yang mendapatkan bantuan dari Kementerian Kominfo RI. Hingga tahun 2017 ada 4 jenis bantuan yang diberikan Kementerian Kominfo RI yaitu *Broadband*, TIK PKP (Pusat Kreatif dan Produktif), Media Center dan perangkat TIK. Bantuan tersebut diberikan ke 3 (tiga) kecamatan yaitu kecamatan Putussibau Utara, Puring Kencana, dan Batang Lupar.
7. Kegiatan Updating Data Pokok, meliputi Penyampaian Formulir pengisian Data Pokok ke Setiap Kecamatan, dan Desa di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu dan Pengembalian Formulir Pengisian Data Pokok yang sudah di isi oleh setiap Kecamatan dan Desa di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu untuk dihimpun, direkapitulasi dan disusun menjadi BUKU DATA POKOK KABUPATEN KAPUAS HULU. Kemudian di distribusikan ke setiap kecamatan dan seluruh OPD.
8. Kegiatan Pemutakhiran Data Rencana Umum Pengadaan dan Pengguna aplikasi E-Procurement. Kegiatan ini dilaksanakan untuk

mendukung kelancaran Pengumuman Rencana Umum Pengadaan dan penggunaan aplikasi SPSE. Adapun pemutakhiran yang dilakukan berupa data pengguna aplikasi SiRUP dalam hal ini digunakan untuk pembuatan akun pada aplikasi SiRUP serta mendukung kelancaran pengumuman Rencana Umum Pengadaan yang harus segera diumumkan pada portal LPSE. Pemutakhiran data ini dilaksanakan dalam rangka update data pengguna aplikasi apabila terdapat perubahan data. Hingga tahun 2016 dilakukan Pemutakhiran Data Pengguna Aplikasi E-Procurement ke 9 (sembilan) Kecamatan dari 23 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu.

9. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Aplikasi SPSE

Monitoring dan Evaluasi dilakukan untuk mengetahui dan mengatasi kendala atau masalah yang terjadi dilapangan sehingga dapat dilakukan proses perbaikan dan perubahan kedepan dalam Penggunaan Aplikasi SPSE. Hingga tahun 2016 Monitoring dan evaluasi dilaksanakan ke 9 (sembilan) Kecamatan dari 23 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu.

10. Kegiatan Sosialisasi Aplikasi *E-Procurement*

Sosialisasi Aplikasi *E-Procurement* diperlukan untuk memberikan pemahaman dan penyampaian informasi kepada Pengguna Aplikasi e-Procurement diantaranya PPK, Pejabat Pengadaan, ULP, Pokja, admin SKPD dan penyedia sehingga informasi tersebut dapat segera diketahui oleh Pengguna Aplikasi e-Procurement dan dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan/kebijakan yang ada. Apabila terdapat perubahan aturan/kebijakan yang berkenaan dengan Pengadaan/Barang Jasa dan juga perubahan Aplikasi E-Procurement maka menjadi satu kewajiban untuk menyampaikan informasi tersebut kepada pengguna LPSE. Sosialisasi Aplikasi E-Procurement 1 (satu) kali setahun.

11. Bimbingan Teknis *E-Procurement*

Bimbingan Teknis *e-Procurement* dilakukan untuk member Pelatihan/Bimbingan Teknis Aplikasi kepada Pengguna Aplikasi *e-Procurement* agar para pengguna Aplikasi dapat mengoperasikan/menggunakan Aplikasi *e-Procurement* secara baik dan benar pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

### a. Tantangan

1. Globalisasi informasi yang berdampak pada kebutuhan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi serta keterbukaan informasi publik;
2. Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
3. Ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang belum merata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pemerataan aksesibilitas telekomunikasi
4. Perlunya membuka jalur akses informasi pada beberapa kegiatan dan organisasi perangkat daerah, sehingga tupoksi penyebarluasan informasi pembangunan yang tercermin dari realisasi kegiatan OPD dapat dipublikasikan secara optimal;
5. Adanya tuntutan masyarakat akan Pemberian informasi layanan publik yang cepat, tepat dan akurat;
6. Keinginan masyarakat akan adanya peningkatan keamanan informasi dan kerjasama dengan pihak penyedia jasa *collocation server*;
7. Perlunya membuka jalur akses informasi pada beberapa kegiatan dan organisasi perangkat daerah, sehingga tupoksi penyebarluasan informasi pembangunan yang tercermin dari realisasi kegiatan OPD dapat dipublikasi secara optimal;
8. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas pengumpulan informasi secara komprehensif sehingga layanan informasi yang lengkap terhadap masyarakat dapat terpenuhi.

### b. Peluang

1. Kabupaten Kapuas Hulu Merupakan Kabupaten terdepan yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, hal ini memberikan dampak positif karena mendorong kementerian-kementerian untuk mendukung program nawacita Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
2. Dukungan aparat pemerintah terhadap keterbukaan informasi yang semakin meningkat;
3. Kebutuhan pengembangan muatan *e-Government* ;
4. Kesadaran dan Kebutuhan masyarakat akan pentingnya

- informasi;
5. Semakin tingginya pemanfaatan perangkat komunikasi oleh masyarakat
  6. Adanya regulasi dari pemerintah pusat yang mendukung pengembangan komunikasi dan informatika;
  7. Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan;
  8. Sikap positif dari pengguna Aplikasi yang ada pada LPSE Kabupaten Kapuas Hulu.

### BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Pada pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika saat ini telah memasuki era reformasi artinya masyarakat telah menuntut adanya transparansi dan keterbukaan serta keberpihakan kepada masyarakat khususnya yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan daerah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung keterlibatan publik dalam pelaksanaan pembangunan, yang salah satunya adalah fasilitasi informasi publik melalui website. Hal ini telah sejalan dengan komitmen pemerintah terkait dengan pembangunan *e-Government* sebagaimana yang terdapat dalam intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional *e-Government*.

Berdasarkan hal tersebut maka pengembangan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.

Identifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam melaksanakan layanan tugas pokok dan fungsi, yaitu :

#### 1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Website Kabupaten Kapuas

Hulu. Dalam pengelolaan website pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu selalu memberikan informasi yang selalu *up to date* baik berita maupun informasi yang lainnya. Bahwa dalam pengelolaan subdomain website resmi OPD di kelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu, ada 8 (delapan) subdomain yang sudah terdaftar, sedangkan website resmi Pemerintah Desa terdapat 2 Desa yang sudah memiliki Website Resmi yaitu Desa Miau Merah dan Desa Sungai Antu, masih banyaknya OPD atau Pemerintah Desa yang belum memiliki website sehingga susah untuk mendapatkan informasi ataupun data dari OPD terkait.

- a. Data domain dan sub domain Pemerintah daerah Kab. Kapuas Hulu.

**Tabel 3.1**  
**Nama Domain dan Sub Domain OPD**  
**Kabupaten Kapuas Hulu**

NO.	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN	KETERANGAN	JUMLAH
1	Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	<a href="http://www.kapuashulukab.go.id">www.kapuashulukab.go.id</a>	Aktif	1
2	Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	<a href="http://www.setda.kapuashulukab.go.id">www.setda.kapuashulukab.go.id</a>	Tidak Aktif	1
3	Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	<a href="http://www.dprd.kapuashulukab.go.id">www.dprd.kapuashulukab.go.id</a>	Aktif	1
4	Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu	-	-	-
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-
6	Dinas Kesehatan	<a href="http://www.dinkes.kapuashulukab.go.id">www.dinkes.kapuashulukab.go.id</a>	Tidak Aktif	1
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-
8	Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air	<a href="http://www.binamarga.kapuashulukab.go.id">www.binamarga.kapuashulukab.go.id</a>	Tidak Aktif	1
9	Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya	<a href="http://www.ciptakarya.kapuashulukab.go.id">www.ciptakarya.kapuashulukab.go.id</a>	Tidak Aktif	1
10	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-
11	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	<a href="http://www.disporapar.kapuashulukab.go.id">www.disporapar.kapuashulukab.go.id</a>	Aktif	1
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<a href="http://www.disdukcapil.kapuashulukab.go.id">www.disdukcapil.kapuashulukab.go.id</a>	Tidak Aktif	1
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	-	-
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-

15	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi	-	-	-
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	-	-	-
17	Dinas Komunikasi, Infomatika dan Statistik	-	-	-
18	Dinas Perhubungan	-	-	-
19	Dinas Pertanian dan Pangan	-	-	-
20	Dinas Perikanan	-	-	-
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-
22	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	<a href="http://www.bappeda.kapuashulukab.go.id">www.bappeda.kapuashulukab.go.id</a>	Aktif	1
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-
25	Badan Keuangan Daerah	-	-	-
26	Kecamatan Putussibau Selatan	-	-	-
27	Kecamatan Putussibau Utara	-	-	-
28	Kecamatan Bika	-	-	-
29	Kecamatan Kalis	-	-	-
30	Kecamatan Mentebah	-	-	-
31	Kecamatan Boyan Tanjung	-	-	-
32	Kecamatan Pengkadan	-	-	-
33	Kecamatan Hulu Gurung	-	-	-
34	Kecamatan Bunut Hilir	-	-	-
35	Kecamatan Bunut Hulu	-	-	-
36	Kecamatan Seberuang	-	-	-
37	Kecamatan Silat Hilir	-	-	-
38	Kecamatan Silat Hulu	-	-	-
39	Kecamatan Semitau	-	-	-
40	Kecamatan Selimbau	-	-	-
41	Kecamatan Suhaid	-	-	-
42	Kecamatan Jongkong	-	-	-
43	Kecamatan Embaloh Hilir	-	-	-
44	Kecamatan Embaloh Hulu	-	-	-

45	Kecamatan Batang Lupar	-	-	-
46	Kecamatan Badau	-	-	-
47	Kecamatan Empanang	-	-	-
48	Kecamatan Puring Kencana	-	-	-
<b>J U M L A H</b>				<b>9</b>

Untuk website Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu ([www.kapuashulukab.go.id](http://www.kapuashulukab.go.id)) masih perlu di *upgrate* karena untuk di buka via Hp masih belum kompetible.

b. Domain website Pemerintah Desa

**Tabel 3.2**  
**Nama Domain Website Kecamatan dan Desa**

NO	NAMA DESA	KECAMATAN	NAMA DOMAIN WEBSITE	JUMLAH
1	Desa Sungai Antu	Puring Kencana	<a href="http://www.sungaiantu.desa.id">www.sungaiantu.desa.id</a>	1
2	Miau Merah	Silat Hilir	<a href="http://www.miaumerah.desa.id">www.miaumerah.desa.id</a>	1
<b>J U M L A H</b>				<b>2</b>

## 2. Kegiatan Penyusunan Updating data Pokok

Dalam melaksanakan penyusunan updating data pokok perlunya kerjasama dengan OPD terkait sehingga dalam mendapatkan data akan lebih mudah dan tidak ada terjadinya kesalah pahaman dalam penyampaian data, kendala yang dihadapi karena tugas dan fungsi kegiatan penyusunan updating data pokok ini baru di limpahkan kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Satatistik Kabupaten Kapuas Hulu sehingga perlu penyempurnaan dalam menyusun updating data pokok Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk itu perlunya sosialisasi terlebih dahulu tentang pemahaman dan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan up dating data pokok.

## 3. Kegiatan Penyebarluasan Informasi dan Penyuluhan melalui *Mobile Community Access Point* (M-CAP). Dalam penyebarluasan informasi dan penyuluhan melalui M-CAP tidak semua kecamatan mendapat layanan ini dikarenakan luas wilayah dan kondisi geografi di Kabupaten Kapuas Hulu tidak terjangkau oleh mobil M-CAP, sehingga hanya Kecamatan-Kecamatan yang dapat di jangkau oleh

mobil M-CAP. Dalam operasional M-CAP perlunya perawatan Mobil dan Perawatan Peralatan yang ada di dalam mobil M-CAP itu sendiri sehingga memerlukan biaya operasional yang cukup tinggi.

#### 4. Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Pembangunan

##### *E-Government* Kabupaten Kapuas Hulu

- Dalam perencanaan dan pengembangan pembangunan *e-Government* Kabupaten Kapuas Hulu belum berjalan optimal dikarenakan layanan *e-Government* masih berjalan sendiri-sendiri serta belum terintegrasinya layanan antar OPD.
- Untuk itu perlunya inventarisir data Aplikasi dan Perangkat layanan yang sudah ada di masing-masing OPD Guna mewujudkan layanan *E-government* kabupaten Kapuas Hulu.
- Perlunya komitmen Pimpinan dalam menerapkan layanan *e-government* ini karena dalam mengembangkan layanan ini perlu SDM handal, Perangkat yang mendukung dan juga anggaran yang cukup besar.

#### 5. Kegiatan Pembinaan Program Desa Teknologi Komunikasi dan Informasi. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pembinaan, monitoring dan evaluasi desa-desa yang mendapatkan bantuan dari Kementerian Kominfo RI adapun Daftar Desa / tempat yang mendapatkan Bantuan adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Nama Desa-Desa yang mendapatkan Bantuan Perangkat TIK dari Kementerian Kominfo RI**

NO	NAMA BANTUAN TIK	LOKASI	KECAMATAN	KETERANGAN	JUMLAH
1	BROADBAND	Kantor Desa Sungai Antu	Puring Kencana	Bantuan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI	1
2	TIK PKP (Pusat Kreatif dan Produktif)	Kantor Kecamatan Puring Kencana	Puring Kencana	Bantuan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI	1
		Kantor Desa Sungai Antu	Puring Kencana	Bantuan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI	1

		Kantor Desa Kantuk Bunut	Puring Kencana	Bantuan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI	1
		Kantor Desa Merakai Panjang	Puring Kencana	Bantuan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI	1
		Kantor Desa Sungai Mawang	Puring Kencana	Bantuan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI	1
		Kantor Desa Langau	Puring Kencana	Bantuan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI	1
3	Media Center	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Putussibau Utara	Bantuan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI	1
4	Perangkat TIK	Desa Sepandan di Kantor Kecamatan Batang Lupar	Batang Lupar	Bantuan Dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi RI	1
<b>J U M L A H</b>					<b>10</b>

6. Kegiatan Perencanaan Sistem Informasi untuk Peringatan Dini dan Manajemen Bencana. Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena setelah dilakukan tinjauan lapangan ditemukan bahwa fasilitas pendukung untuk melakukan pembangunan program kegiatan perencanaan sistem informasi untuk peringatan dini dan manajemen bencana belum ada atau tidak mendukung sehingga program tidak dapat dilaksanakan.

7. Diseminasi Informasi melalui media LPPL Rasika 103,4 FM

Dalam pelaksanaan kegiatan diseminasi informasi melalui media radio, permasalahan yang diperoleh terletak pada cakupan atau jangkauan siaran frekuensi radio yang semakin tahun mengalami penurunan, sehingga mengakibatkan target kinerja berupa jumlah informasi yang disampaikan dapat tercapai, namun sasaran penerima informasi mengalami penurunan.

**Tabel 3.4**  
**Hasil Monitoring Frekuensi Radio Rasika**

NO	TAHUN	JANGKAUAN	KET.
1	2013	1. Wilayah Utara : sampai dengan Kecamatan Batang Lupar 2. Wilayah Selatan : sampai dengan Kecamatan Pengkadan 3. Wilayah Sungai : sampai dengan Kecamatan Jongkong	
2	2014	1. Wilayah Utara : sampai dengan Kecamatan Batang Lupar 2. Wilayah Selatan : sampai dengan Kecamatan Boyan Tanjung 3. Wilayah Sungai : sampai dengan Kecamatan Bunut Hilir	
3	2015	1. Wilayah Utara : sampai dengan Kecamatan Benua Martinus/Mataso 2. Wilayah Selatan : sampai dengan Kecamatan Sungai Besar 3. Wilayah Sungai : sampai dengan Kecamatan Bunut Hilir	
4	2016	1. Wilayah Utara : sampai dengan Kecamatan Putussibau Utara / Sui Uluk 2. Wilayah Selatan : sampai dengan Kecamatan Sungai Besar 3. Wilayah Sungai : sampai dengan Kecamatan Embaloh Hilir	

8. Pembentukan dan pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat  
Dalam pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), terdapat permasalahan pada aspek kapasitas sumber daya TIK yang terbatas untuk anggota KIM di wilayah pedesaan/kecamatan dan kurangnya fasilitas media informasi berupa broadband berkualitas di wilayah kecamatan/desa kelompok KIM itu berada. Adapun data fasilitas informasi KIM yang dimiliki dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 3.5**  
**Data Media Informasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)**

NO	NAMA KIM	DESA	KECAMATAN	SUMBER MEDIA INFORMASI
1	Ketam Bersatu	Sungai Besar	Bunut Hulu	Sudah Di Bantu Akses Internet Dan Radio Monitor
2	Nandang Pasulang	Tekudak	Kalis	Sudah Di Bantu Akses Internet Dan Radio Monitor
3	Saridan	Sebintang	Kalis	Perangkat Radio
4	Nandang Tekalong	Tekalong	Mentebah	Sudah Di Bantu Akses Internet Dan Radio Monitor
5	Dengah	Tanjung Karang	Putussibau Utara	Perangkat Radio
6	Sekilas Info	Tanjung Jati	Putussibau Selatan	Sudah Di Bantu Akses Internet Dan Radio Monitor
7	Bukit Biru	Sejiram	Seberuang	Perangkat Radio
8	Kedaung Mahkota Info	Nibung	Selimbau	Tidak memiliki media informasi
9	Sura Dirja	Bunut Hulu	Bunut Hilir	Sudah Di Bantu Akses Internet
10	Piasak Info	Piasak Hilir	Piasak Hilir	Sudah Di Bantu Akses Internet
11	Dangona Banuaka	Ulak Pauk	Embaloh Hulu	Tidak memiliki media informasi
12	Podi Informatika	Martadana	Pengkadan	Tidak memiliki media informasi
13.	Amkers Mania	Kelakar	Hulu Gurung	Tidak memiliki media informasi
14	Ampan Informatika	Permata	Pengkadan	Tidak memiliki media informasi

Dengan minimnya media informasi sebagai sumber pengelolaan berita/informasi menyebabkan rendahnya produktifitas KIM dalam melaksanakan peran-nya di masyarakat.

9. Dokumentasi kegiatan pembangunan daerah.

Kegiatan Dokumentasi pembangunan daerah merupakan rangkaian kegiatan pencarian informasi, pengolahan sampai dengan pendokumentasian dalam bentuk penerbitan Buletin Uncak Kapuas. Permasalahan yang dihadapi adalah rendahnya minat baca masyarakat terhadap media cetak dikarenakan pesatnya informasi yang hadir melalui media online dan mobile. Data terkait rendahnya minat baca masyarakat pada media cetak/bulletin uncak Kapuas belum pernah di survey secara resmi, namun hal ini dapat disimpulkan berdasarkan observasi terhadap gaya hidup masyarakat secara umum di Kabupaten Kapuas Hulu pada rentang usia 17 – 40 Tahun yang lebih intens mencari informasi melalui media online/gadget;

10. Partisipasi pada kegiatan Apresiasi Media Pertunjukan Rakyat (METRA).

Partisipasi pada kegiatan METRA merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan mulai tahun 2015. Pada kegiatan ini tidak terdapat kendala yang signifikan, dikarenakan hanya berupa keikutsertaan Pemerintah Daerah pada event regional dan nasional. Namun pada tahun 2017, kegiatan ini tidak dilaksanakan dikarenakan pembentukan nomenklatur baru di Provinsi Kalimantan Barat sebagai penyelenggara kegiatan tingkat regional, sehingga pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mengirimkan peserta untuk kegiatan dimaksud.

11. Error pada Aplikasi *E-Procurement* sehingga mengganggu fasilitasi pengumuman Rencana Umum Pengadaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang menggunakan Aplikasi SPSE.

12. Kesulitan akses internet pada tingkat Kecamatan dalam mengumumkan RUP dan mengakses Aplikasi *E-Procurement*.

13. Rencana Umum Pengadaan yang seharusnya wajib diumumkan belum dilaksanakan sepenuhnya oleh SKPD.

14. Pengetahuan Pengguna Aplikasi *E-Procurement* terhadap penggunaan Aplikasi *E-Procurement*.

### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

#### a. Visi Kabupaten Kapuas Hulu

##### ***“Menuju Kapuas Hulu yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing dan Harmonis”***

Visi tersebut menggambarkan harapan keinginan/mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, berdaya saing dan harmonis dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Kapuas Hulu yang Sejahtera, mengandung arti suatu kondisi keadaan masyarakat Kapuas Hulu yang maju serta terpenuhinya kebutuhan dasar dan sekunder secara lahir dan bathin terpenuhi dengan didukung oleh suasana kehidupan yang aman, dan damai.
2. Kapuas Hulu yang Berdaya Saing, mengandung arti dimana perekonomian masyarakat berkembang dengan baik, kreatif, dan inovatif sehingga mempunyai daya saing tinggi yang ditandai dengan meningkatnya investasi dan kapasitas ekonomi masyarakat, serta membaiknya infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
3. Kapuas Hulu yang Harmonis, mengandung arti kondisi dimana kehidupan masyarakat berlangsung dengan rukun, damai , taat dan tertib hukum, sadar politik, demokratis, dan dinamis.

#### b. Misi

##### **1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Baik dan Bersih.**

Misi ini bertujuan terselenggaranya pemerintahan yang profesional dan pelayanan publik yang prima dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah melalui pendayagunaan perencanaan, pengawasan dan mendorong akuntabilitas guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang profesional, transparan, kredibilitas,antisipatif dan akuntabilitas.

## **2. Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Yang Bertumpu Pada Sumber Daya Daerah Yang Berkelanjutan**

Misi ini bertujuan untuk meningkatnya perekonomian daerah dengan mengoptimalkan potensi daerah dan perluasan kesempatan berusaha, meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta meningkatnya Keluarga Berencana, kesejahteraan sosial, Perlindungan perempuan dan anak. Potensi yang dimiliki Kabupaten Kapuas Hulu adalah pertanian dalam arti luas yang meliputi: Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Kehutanan Perikanan yang merupakan mata pencaharian sekitar 80 % rakyat Kabupaten Kapuas Hulu sebagai modal dasar yang sangat berarti untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

## **3. Meningkatkan Layanan Infrastruktur Dasar Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan**

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, menjadikan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai kabupaten yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip konservasi, sehingga dalam memanfaatkan sumber daya untuk pembangunan senantiasa berlandaskan kepada pemanfaatan berkelanjutan, perlindungan sistem penyangga kehidupan, dan pengawetan keanekaragaman hayati dengan sasaran adalah terjaganya kawasan konservasi sehingga kawasan tersebut dapat berperan dan berfungsi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misi tersebut juga bertujuan meningkatkan sarana prasarana dan kelancaran aksesibilitas daerah, membuka daerah terpencil, terisolir dan pengawasan wilayah perbatasan hal tersebut untuk mendukung pembangunan melalui pinggiran sehingga akan memicu pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata.

### **c. Program Kabupaten Kapuas Hulu**

Program pembangunan daerah dirumuskan sesuai dengan janji Bupati dan Wakil Bupati selama kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan disusun berdasarkan bidang urusan yang menjadi prioritas pertama dalam program pembangunan daerah selama lima tahun. Janji Bupati dan Wakil Bupati tersebut kemudian dijabarkan

kedalam visi, misi, tujuan dan sasaran (indikator dan target) pembangunan. Untuk mencapai indikator target kinerja visi dan misi pada sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka strategi atau prioritas pembangunan menjadi sarana untuk mendapatkan rumusan tentang program prioritas yang akan diselenggarakan oleh Perangkat Daerah terkait. Program perangkat daerah di masing-masing prioritas pembangunan selanjutnya disebut program pembangunan daerah untuk menggambarkan capaian atau dukungannya secara langsung terhadap sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk mendapatkan rumusan program pembangunan daerah yang tepat pada masing-masing prioritas pembangunan maka dirumuskan arah kebijakan.

Mengingat RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 telah dilaksanakan pada tahun 2016 dan 2017 melalui RKPD maka perlu adanya urgensi kebijakan yang mampu menyelesaikan permasalahan terhadap kondisi daerah sekarang ini. Program-program berikut, dalam perumusannya dijabarkan langsung dari visi dan misi Bupati namun tetap dalam koridor sebagai pendukung atau prasyarat tercapainya visi dan misi Renstra Perangkat Daerah, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.6.

**Tabel 3.6**  
**Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021**  
**Dalam Rangka Pencapaian Visi dan Misi Bupati**

Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	OPD Penanggung Jawab
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	Reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan	Perbaikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Program perencanaan pembangunan daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik
			Program penguatan organisasi dan reformasi birokrasi	Sekretariat Daerah
			Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Inspektorat
Meningkatnya kinerja pelayanan masyarakat		Perbaikan kualitas layanan publik	Program penguatan organisasi dan reformasi birokrasi	Sekretariat Daerah

Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	OPD Penanggung Jawab
Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah		Perbaikan pengelolaan keuangan daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Daerah
			Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota	Badan Keuangan Daerah
			Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Inspektorat
			Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Inspektorat
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah	Pengembangan industri ekonomi sektor pertanian	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Dinas Pertanian dan Pangan
			Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Dinas Pertanian dan Pangan
			Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Dinas Pertanian dan Pangan
			Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Dinas Pertanian dan Pangan
			Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Dinas Pertanian dan Pangan
			Program pengembangan budidaya perikanan	Dinas Perikanan
			Program pengembangan perikanan tangkap	Dinas Perikanan
			Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Dinas Perikanan
			Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air

Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	OPD Penanggung Jawab
Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kapuas Hulu		Pembangunan dan pengembangan kawasan periwisata	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Pembangunan kelembagaan kepariwisataan	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Pemasaran destinasi wisata yang terintegrasi dan tepat sasaran	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Menurunnya pengangguran masyarakat		Pemerataan pembangunan ekonomi seluruh wilayah	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
			Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
		Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
		Pemberdayaan masyarakat desa	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Peningkatan kualitas pelayanan investasi daerah	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan	Peningkatan kualitas Pembangunan SDM masyarakat Kapuas Hulu	Pemerataan dan Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Program Pendidikan Non Formal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Program Kesehatan Ibu, Balita dan Keluarga	Dinas Kesehatan

Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	OPD Penanggung Jawab
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit serta Penyehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan
			Program Standarisasi / Mutu pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan
			Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin	Dinas Kesehatan
			Program Obat, perbekalan kesehatan dan pengawasan makanan	Dinas Kesehatan
			Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
Meningkatnya daya beli masyarakat		Peningkatan pendapatan masyarakat	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
			Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur permukiman yang berorientasi lingkungan	Pemerataan pembangunan keseluruhan wilayah yang berorientasi lingkungan	Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air
			Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air
			Program pembangunan infrastruktur perdesaaan dan perkotaan	Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya
			Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya
		Peningkatan penataan penanganan kawasan kumuh dan rumah layak huni	Program Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Lingkungan Perumahan	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Program Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	OPD Penanggung Jawab
			Program penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dan Relokasi Program Pemerintah	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Peningkatan Kualitas lingkungan air dan penanganan sampah	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

### 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika

Visi dan Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika mengacu pada Visi dan Misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla. Dalam Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019, pembangunan Bidang komunikasi dan informatika lima tahun kedepan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecakupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika dalam Renstra tahun 2015-2019 akan fokus membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet, dan digitalisasi siaran televisi.

Adapun sasaran strategis pembangunan di bidang komunikasi dan informatika meliputi :

1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran Negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan
2. Tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan
3. Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informatika yang efisien, berdaya saing dan aman
4. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola kementerian komunikasi dan informatika yang berintegritas, bersih, efektif dan efisien.

Program yang berkaitan dengan bidang komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan akses informasi, komunikasi dan telematika
2. Program pengembangan komunikasi dan informatika.

#### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Prioritas pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu diarahkan untuk mendorong keberhasilan Visi menuju Kapuas Hulu yang lebih sejahtera, berdaya saing dan harmonis melalui :

1. Peningkatan Kualitas Layanan Publik.

Fokus prioritas :

- Peningkatan sarana prasarana dan mutu pendidikan.
- Pemerataan pelayanan kesehatan.
- Peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga kerja.
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pengurangan angka kemiskinan.

2. Peningkatan Infrastruktur Dasar

Fokus prioritas :

- Meningkatkan keterbukaan dan konektivitas antar kecamatan dan desa.
- Pengembangan sarana dan prasarana dasar pada kawasan

ekonomi produktif.

- Peningkatan infrastruktur Air Bersih yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Meningkatkan rasio elektrifikasi yang diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya energi terbarukan.

3. Menciptakan Lingkungan Usaha Yang Kondusif

Fokus prioritas :

- Penataan regulasi daerah tentang perizinan yang efektif dan efisien.
- Penguatan kelembagaan Koperasi dan UMKM

4. Peningkatan produktivitas Masyarakat

Fokus prioritas :

- Intensifikasi dan Ekstensifikasi lahan pertanian yang di arahkan pada peningkatan kemandirian pangan.
- Peningkatan budidaya perikanan yang di arahkan pada peningkatan produksi perikanan.
- Pengembangan produk unggulan perkebunan masyarakat.
- Pelestarian dan pemanfaatan hasil hutan non kayu.

5. Meningkatkan kemampuan tata kelola pemerintahan yang akuntabel

Fokus prioritas :

- Pengembangan SDM aparatur.
- Pembinaan aparatur pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa.
- Perbaikan kualitas perencanaan pembangunan.

Peningkatan pengelolaan keuangan daerah secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.

6. Menjaga dan memelihara suasana yang harmonis

Fokus prioritas :

- Meningkatkan kerukunan antar umat beragama.
- Menegakkan supremasi hukum, pembinaan dan penyuluhan hukum dan peningkatan kerja sama kemitraan dengan lembaga kemasyarakatan.
- Mengintensifkan dialog lintas suku bangsa dan agama secara periodik, peningkatan pembinaan dan bantuan natura pada rumah ibadah dan memberdayakan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama.
- Melestarikan warisan budaya dan kearifan lokal.

### 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Adapun isu – isu strategis dinas berkaitan dengan permasalahan tugas dan fungsi OPD, adalah :

#### **FAKTOR EKSTERNAL**

1. Kabupaten Kapuas Hulu Merupakan Kabupaten terdepan yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, hal ini memberikan dampak positif karena mendorong kementerian-kementerian untuk mendukung program nawacita Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Selain itu, terdapat pula dampak negative yang terlihat saat ini adalah rasa nasionalisme yang dimiliki masyarakat perbatasan untuk wilayah yang kurang tersentuh pembangunan masih rendah. Hal ini terlihat dari kehidupan ekonomi masyarakat dimana kebutuhan sembako masih menggunakan produk negara tetangga.
1. Penerapan Sistem *E-Government*. Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Pelaksanaan *E-Government* yang merupakan suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan system manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Deklarasi Anti Hoax merupakan gerakan yang di prakarsai oleh Kementrian Komunikasi Informatika yang mana tujuannya memerangi berita bohong yang diproduksi dan tersebar di media online dan media sosial yang menyebabkan pertengkaran, saling membenci dapat di kikis dengan kedewasaan, dengan pendidikan, cek and ricek mana berita online yang terpercaya mana yang jangan terlalu di percaya sehingga menjadi dewasa, karena masalah yang dihadapi sekarang ini di masyarakat adalah bukan mencari informasi tapi memilah informasi, mana yang aktual, fakta dan terpercaya. Pendidikan memilah informasi, mana yang aktual, fakta dan terpercaya merupakan salah satu aspek pendidikan yang di laksanakan dalam sosialisasi penggunaan Internet Sehat.
3. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang diluncurkan pada 31 Desember 2015 memberikan dampak signifikan pada Kabupaten Kapuas Hulu yang mana merupakan Kabupaten terdepan yang

berbatasan langsung dengan Negara Malaysia. Keseriusan Pemerintah Pusat akan pentingnya MEA ditandai dengan salah satunya Pembangunan PLB (Pos Lintas Batas) Badau.

4. Pengelolaan aplikasi elektronik berbasis data base dan terintegritas untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran dalam pelayanan antara pemerintah dan masyarakat.
5. Kewajiban seluruh LPSE di Indonesia untuk memenuhi 17 Standard LPSE paling lambat tahun 2018.
6. Modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa.
7. Kewajiban K/L/D/I menggunakan e-catalog dalam pengadaan barang pemerintah (Pasal 110 Perpres no.4 tahun 2015).

#### **FAKTOR INTERNAL**

1. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur perangkat/media Informasi dan Komunikasi dalam mendukung kebijakan daerah;
2. Belum dimilikinya system/unit pengaduan online, yang mengakibatkan buruknya citra kinerja pemerintah daerah karena maraknya aduan aduan yang didiskusikan oleh masyarakat pada media social yang tidak dapat dikontrol oleh pemerintah daerah;
3. Belum optimalnya mekanisme pengelolaan informasi publik, khususnya hal-hal yang terkait dengan pengelolaan informasi Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID);
4. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (TIK) dalam pengelolaan dan penyediaan akses informasi dan komunikasi publik dalam mendukung kebijakan daerah.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun, yang menggambarkan arah strategis organisasi. Dengan tujuan ini Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan sasaran dengan mempertimbangkan sumber daya manusia, kemampuan yang dimiliki, Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya. Tujuan yang ingin dicapai Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
2. Meningkatkan kualitas data Statistik Lintas Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu.

Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu adalah indikator kinerja dalam mencapai tujuan periode 2017-2021 yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan informasi publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
3. Tersedianya data pokok pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Lebih jelas mengenai Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada tabel 4.1.

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Meningkatnya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1 Predikat Sakip	-	-	B	B	B
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan informasi publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	1 Indek Kepuasan Masyarakat	72	73	75	78	80
			2 Persentase intergrasi Layanan Teknologi Informasi dan Teknologi OPD	-	15%	46%	72%	100%
			3 Persentase penyebaran informasi publik melalui media massa dan media online	100	100	100	100	100
2	Meningkatkan kualitas data statistik Lintas sektoral kabupaten Kapuas Hulu	Tersedianya data statistik Lintas Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu	1 Persentase Kompilasi Ketersediaan Data Statistik Lintas Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu	100	100	100	100	100

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. Strategi dan Kebijakan Prioritas**

##### **a. Strategi**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Kapuas Hulu, maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu menyusun dan melaksanakan strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas layanan publik dan informasi publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi kepada masyarakat melalui berbagai media;
3. Menerapkan SPSE dilingkup Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
4. Meningkatkan kompilasi data statistik lintas sektoral Kabupaten Kapuas Hulu.

##### **b. Kebijakan**

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai Tujuan dan Sasaran organisasi maka kebijakan-kebijakan yang diambil yaitu sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyelenggaraan layanan komunikasi pendukung penerapan E-Government Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Melaksanakan optimalisasi penyebaran informasi kepada masyarakat;
3. Melaksanakan reformasi birokrasi melalui pengadaan barang dan jasa secara elektronik;
4. Melaksanakan Updating data pokok pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada tabel 5.1.

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu**

<b>VISI : MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN HARMONIS</b>						
<b>MISI I : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Baik dan Bersih</b>						
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>		<b>STRATEGI</b>		<b>KEBIJAKAN</b>	
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1.1	Meningkatnya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1.1	Meningkatkan kualitas layanan publik dan informasi publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	1.1	Melaksanakan penyelenggaraan layanan komunikasi pendukung penerapan E-Government Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
	1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan informasi publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	1.2	Meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi kepada masyarakat melalui berbagai media	1.2	Melaksanakan optimalisasi penyebaran informasi kepada masyarakat
			1.3	Menerapkan SPSE dilingkup Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	1.3	Melaksanakan reformasi birokrasi melalui pengadaan barang dan jasa secara elektronik
Meningkatkan kualitas data statistik Lintas sektoral Kabupaten Kapuas Hulu	2.2	Tersedianya data pokok pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	2.2	Meningkatkan kompilasi data statistik lintas sektoral Kabupaten Kapuas Hulu	2.2	Melaksanakan Updating data pokok pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,**  
**SERTA PENDANAAN INDIKATIF**

**6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik**

Program dan rencana kegiatan adalah untuk meningkatkan kelancaran pelayanan dan pelaksanaan kegiatan. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Huludalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi akan melaksanakan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah disusun dan direncanakan dalam renstra. Maka program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika Kabupaten Kapuas Hulu berupa :

**A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik.
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
8. Penyediaan Komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor
9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10. Penyediaan Jasa pendukung kantor
11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
12. Penyediaan Makanan dan Minuman
13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
14. Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
15. Penyediaan administrasi pengadaan barang dan jasa
16. Pelaksanaan administrasi kepegawaian di lingkungan SKPD
17. Penyediaan Jasa pendukung kantor
18. Penyediaan jasa publikasi
19. Memfasilitasi rapat koordinasi bidang komunikasi dan informatika se-Kalimantan Barat

**B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana**

1. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional roda 4
2. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional roda 2
3. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional
4. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
5. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
6. Pengadaan Booster untuk LPPL
7. Pengadaan Televisi
8. Pengadaan Laptop Space Multi Media
9. Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor
10. Pembangunan Gedung Kantor
11. Perencanaan pembangunan jaringan konektivitas antar OPD
12. Pengadaan jaringan konektivitas antar OPD
13. Rehap ruangan LPPL Rasika
14. Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor

**C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapan
2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

**D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja**

1. Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisari realisasi kinerja SKPD
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
3. Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP)
4. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

**E. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

**F. Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik**

1. Dokumentasi kegiatan pembangunan daerah.
2. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui media elektronik dan daring.

3. Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).
4. Pengelolaan Opini dan Aspirasi Masyarakat melalui Sistem Informasi Layanan Publik.
5. Penyelenggaraan dan partisipasi kelompok Petunra dalam kegiatan METRA.
6. Peningkatan Kapasitas SDM Komunikasi Informasi.
7. Penyediaan Layanan Informasi Publik.
8. Monitoring Isu Publik pada media cetak dan daring.
9. Fasilitasi sengketa informasi.

#### **G. Program Pengembangan Data dan Informasi**

1. Penyusunan data statistik daerah.
2. Penggandaan distribusi dokumen data statistic daerah.
3. Sistem Informasi data statistik daerah.
4. Penyusunan data statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Kapuas Hulu
5. Peningkatan Kompetensi kreatifitas SDM statistik

#### **H. Program Program Aplikasi Informatika**

1. Pengelolaan dan Pengembang Data Center Kabupaten Kapuas Hulu
2. Pengelolaan dan Pengembangan Website Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
3. Pelatihan Website untuk OPD, Kecamatan dan Desa
4. Pengelolaan dan Pengembangan Website Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
5. Pembinaan dan Pengembangan Aplikasi Generik Kabupaten Kapuas Hulu
6. Sosialisasi Internet Sehat di Kabupaten Kapuas Hulu
7. Pendampingan dan fasilitasi bantuan program KPU/USO
8. Pendampingan dan Fasilitasi Pembangunan Akses jaringan Internet
9. Pendampingan dan Fasilitasi Pembangunan Desa Broadband Terpadu

**I. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi**

1. Pembinaan Program Desa Teknologi, Komunikasi dan Informasi
2. Penyebarluasan Informasi dan Penyuluhan *Melalui Mobile Community Acces Point (M-CAP)*
3. Pengelolaan dan operasional media informasi melalui media center
4. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kab. Kapuas Hulu
5. Pemutakhiran Data Rencana Umum Pengadaan dan Pengguna aplikasi *E-Procurement*
6. Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Aplikasi SPSE
7. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Publik
8. Sosialisasi Sistem Informasi Publik

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN URUSAN STATISTIK**

#### **7.1. Indikator Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Kondisi yang diharapkan adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik harus memiliki kemampuan/kapasitas dalam melayani tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan, dinamika dan kemajuan teknologi, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional dapat dicapai.

Berdasarkan hal tersebut peluang Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagai lembaga teknis daerah dan pengelolaan teknologi informasi untuk menjadi konsultan perencanaan. Kemampuan/kapasitas tersebut tergantung pada sarana dan prasarana pendukung, antara lain, gedung/kantor yang representatif dan peralatan teknologi baik yang digunakan untuk penunjang aktivitas maupun untuk pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi. Indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel 7.1.

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu**  
**Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2016-2021**

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Target
(1)	(2)	(3)	Target	Target	Target	Target	Target	Target
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		100%	100%	100%	100%	100%	100%
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "Baik"		100%	100%	100%	100%	100%	100%
3. Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 tahun		90%	92%	95%	97%	100%	100%
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		85%	87%	90%	95%	100%	100%
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah			B	B	B	B	B
6. Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik	Persentase penyebaran informasi publik melalui media massa dan media online		80%	83%	85%	90%	100%	100%
	Persentase meningkatnya akses layanan dan jumlah informasi publik		80%	90%	95%	100%	100%	100%
7. Program Aplikasi dan Informatika	Persentase pemanfaatan aplikasi informatika dalam penyelenggaraan pemerintahan			40%	45%	50%	60%	75%
	Persentase integrasi layanan teknologi informasi dan teknologi OPD				15%	46%	72%	100%
8. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase Efektifitas Fasilitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara Elektronik		100%	100%	100%	100%	100%	100%
9. Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah	Persentase Kompilasi ketersediaan Data Statistik Lintas Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu		100%	100%	100%	100%	100%	100%

## **BAB VIII PENUTUP**

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021 ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu yang memuat program, kegiatan, strategi dan kebijakan serta tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama lima tahun ke depan. Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021 merupakan penjabaran dan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang disusun dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

Dokumen Renstra ini menjadi acuan bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja). Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mencakup berbagai indikator kinerja dan sasaran yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian rencana yang sudah dirumuskan.

Demikian Dokumen Renstra ini disusun, diharapkan menjadi koridor pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat mencapai target sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan *E-government* di Kabupaten Kapuas Hulu. Selain itu disadari masih banyak kelemahan dan kekurangan-kekurangan data dalam penyusunan dokumen Renstra, kami berharap adanya kritik dan saran yang membangun demi peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat.

**Putussibau, Desember 2017  
Kepala Dinas  
Komunikasi, Informatika dan Statistik  
Kabupaten Kapuas Hulu,**

**Ir. ISTIWA, M.Si  
Pembina TK.I (IV/b)  
NIP. 19650507 199803 1 006**

